



REVITALISASI PENGARUSUTAMAAN GENDER PROVINSI JAWA TIMUR

Disampaikan Suti'ah S.Pd (Fasilitator PUG Jawa Timur)
Kota Malang, 7 Maret 2024



@dp3akjatim.official



<https://dp3ak.jatimprov.go.id>



DP3AK JATIM



1. Amanah “PUG” GLOBAL dan NASIONAL

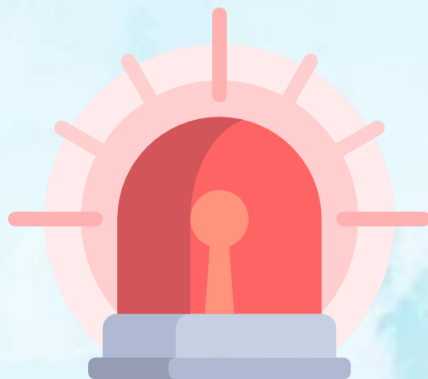


UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*

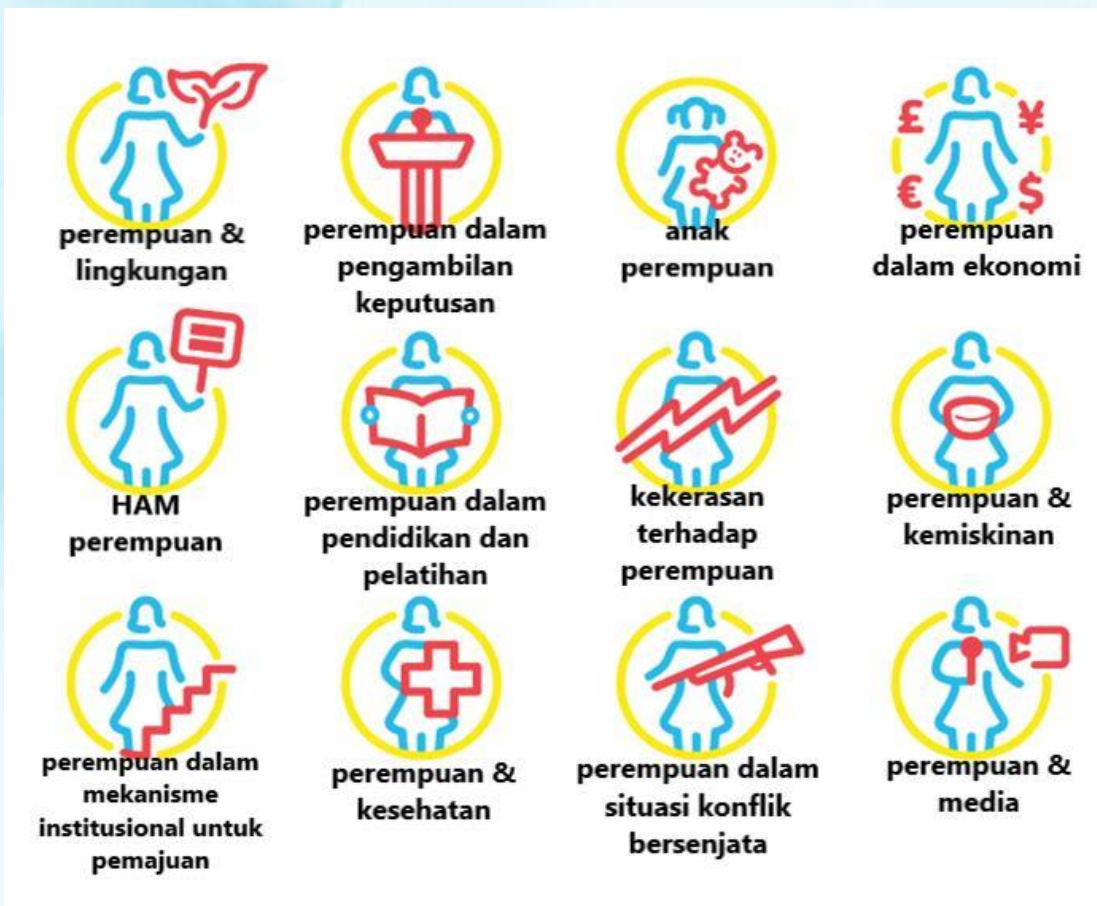
1.	Negara-negara Peserta wajib melakukan segala langkah-tindak yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan politik dan publik negara dan, khususnya, wajib memastikan bagi perempuan, setara dengan laki-laki
2.	Negara-negara Peserta wajib melakukan segala langkah-tindak yang diperlukan untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan untuk menjamin bagi mereka hak-hak yang setara dengan laki-laki dalam bidang pendidikan dan khususnya untuk menjamin, atas dasar kesetaraan laki-laki dan perempuan
3.	Negara-negara Peserta wajib melakukan segala langkah-tindak yang diperlukan untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang kesempatan kerja untuk menjamin, atas dasar kesetaraan laki-laki dan perempuan, hak-hak yang sama
4.	Negara-negara Peserta wajib melakukan segala langkah yang diperlukan untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang pelayanan kesehatan untuk menjamin, atas dasar kesetaraan laki-laki dan perempuan, akses terhadap pelayanan perawatan kesehatan, termasuk yang berhubungan dengan keluarga berencana
5.	Negara-negara Peserta wajib menjamin bagi perempuan pelayanan yang tepat berkaitan dengan masa kehamilan, kelahiran dan pasca-kelahiran, memberikan pelayanan cuma-cuma dimana perlu, serta pemberian makanan bergizi yang cukup selama masa kehamilan dan menyusui
6.	Negara-negara Peserta wajib melakukan langkah-tindak yang diperlukan untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang ekonomi dan kehidupan sosial untuk menjamin, atas dasar kesetaraan laki-laki dan perempuan, hak-hak yang sama
7.	Negara-negara Peserta wajib memperhatikan masalah-masalah khusus yang dihadapi oleh perempuan pedesaan dan peran penting perempuan pedesaan dalam mempertahankan kelangsungan hidup ekonomi keluarganya, termasuk pekerjaan mereka dalam sektor ekonomi yang tidak dinilai dengan uang, dan wajib melakukan segala langkah yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaan ketentuan Konvensi ini bagi perempuan di daerah pedesaan
8.	Negara-negara Peserta wajib melakukan segala langkah-tindak yang diperlukan untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan di daerah pedesaan dan menjamin, atas dasar kesetaraan laki-laki dan perempuan, bahwa mereka dapat ikut serta dalam dan mendapat manfaat dari pembangunan pedesaan dan, khususnya, wajib menjamin perempuan hak
9.	Negara-negara Peserta wajib memberikan kepada perempuan persamaan hak dengan laki-laki di muka hukum
10.	Negara-negara Peserta wajib memberikan kepada perempuan, dalam semua urusan sipil, kecakapan hukum yang sama dengan laki-laki dan kesempatan yang sama untuk menjalankan kecakapan tersebut
11.	Negara-negara Peserta wajib memberikan kepada laki-laki dan perempuan hak-hak yang sama berkenaan dengan hukum yang berhubungan dengan mobilitas orang-orang dan kebebasan untuk memilih tempat tinggal dan domisilinya
12.	Negara-negara Peserta wajib melakukan langkah-tindak yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam semua urusan yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan keluarga dan khususnya wajib menjamin, atas dasar kesetaraan laki-laki dan perempuan



Beijing Declaration and Platform for Actions (BPfA) Tahun 1995



***12 Area Kritis
untuk mempercepat
Kesetaraan Gender***





17SDGs

1. Tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia.
2. Tidak ada lagi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan.
3. Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di segala umur.
4. Menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang, menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.
5. **Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan.**
6. Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang.
7. Menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan dan modern untuk semua orang.
8. Mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, lapangan kerja yang penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua orang.
9. Membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi.
10. Mengurangi ketidaksetaraan baik di dalam sebuah negara maupun di antara negara-negara di dunia.
11. Membangun kota-kota serta pemukiman yang inklusif, berkualitas, aman, berketahanan dan berkelanjutan.
12. Menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi.
13. Bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.
14. Melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan pembangunan yang berkelanjutan.
15. Melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.
16. Meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.
17. Memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Perpres No. 59/2017





UU 17/2007 tentang RPJPN 2005-2025



RPJMN 1 (2005-2009)

- Mengendalikan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk
- **Meningkatnya kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan**
- **Meningkatnya IPG**
- Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak



RPJMN 2 (2010-2014)

- Terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk
- **Meningkatnya kesetaraan gender**
- Meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan, dan perlindungan anak



RPJMN 3 (2015-2019)

- Tercapainya kondisi penduduk tumbuh seimbang
- **Meningkatnya kesetaraan gender**
- Meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan, dan perlindungan anak



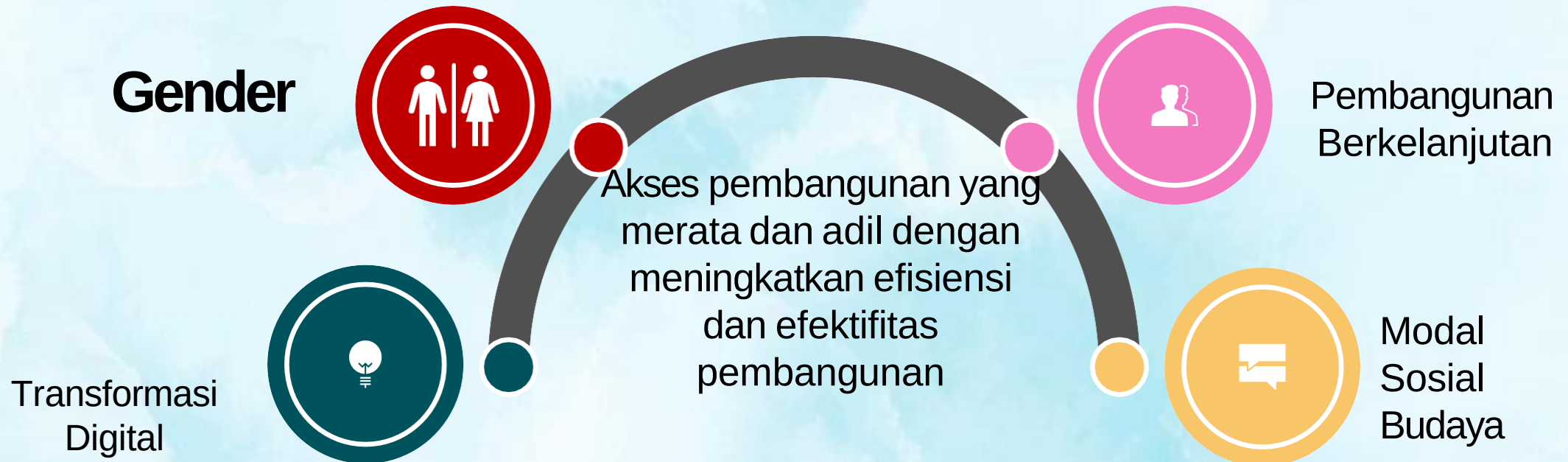
RPJMN 4 (2020-2024)

- Bertahannya kondisi penduduk tumbuh seimbang
- **Terwujudnya kesetaraan gender**
- Meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan, dan perlindungan anak

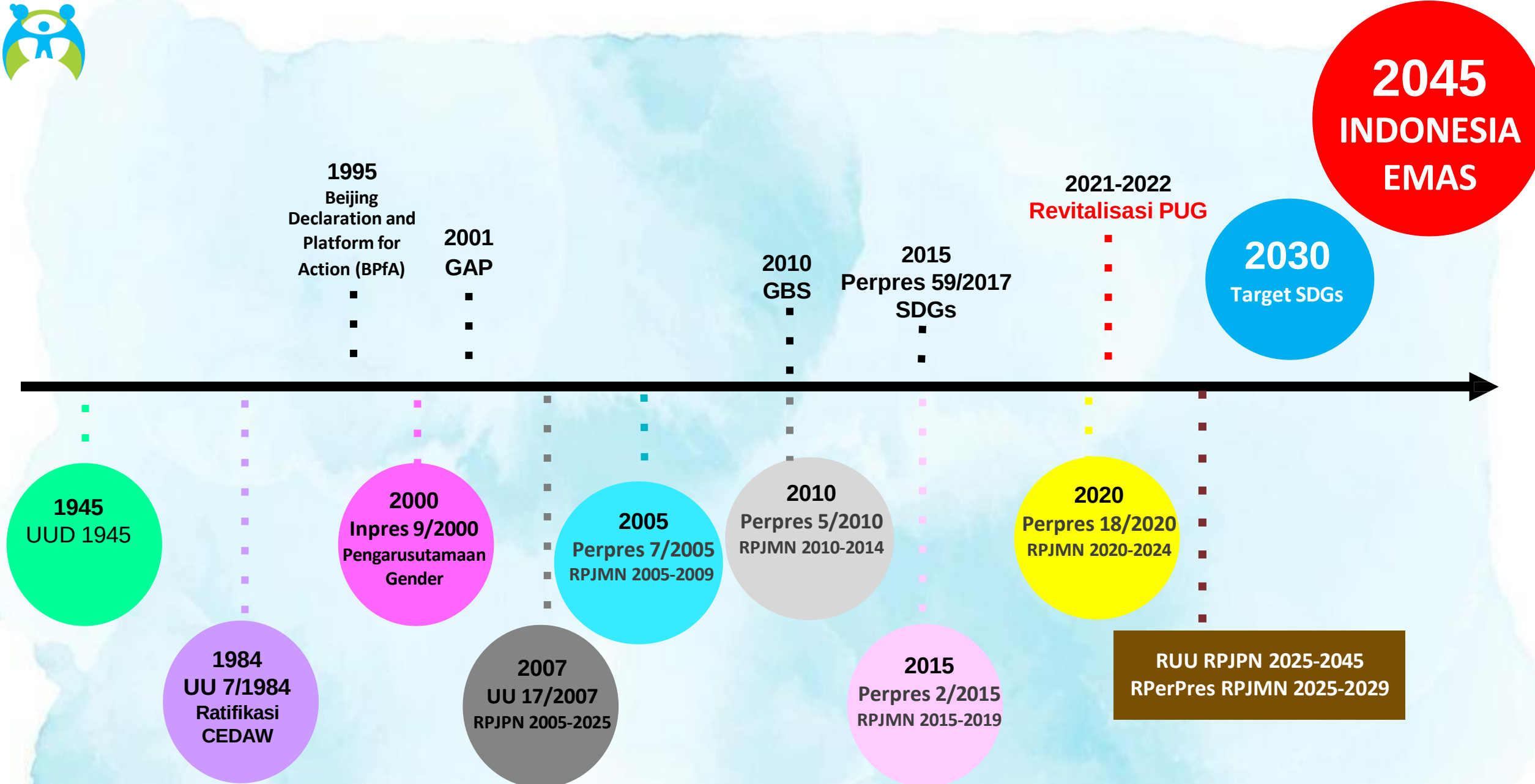
RUU RPJPN 2025-2045

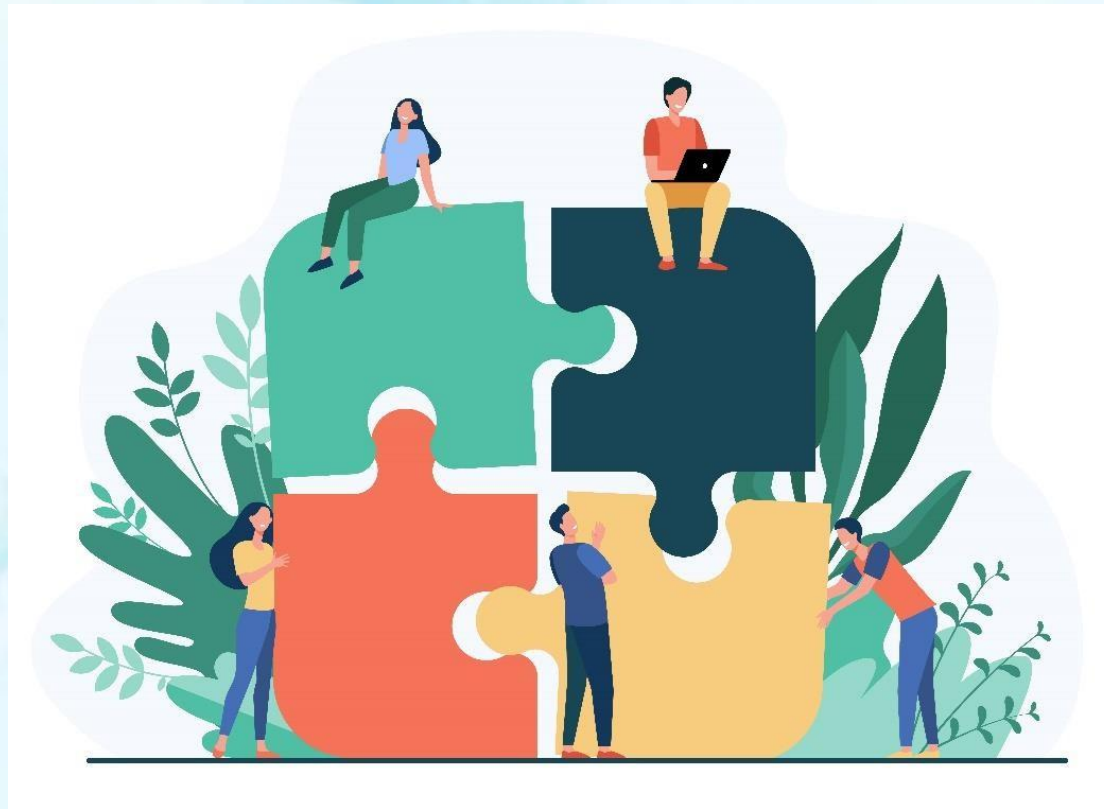


Pengarusutamaan dalam RPJMN IV (2020-2024)



**RPerPres
RPJMN 2025-2029**



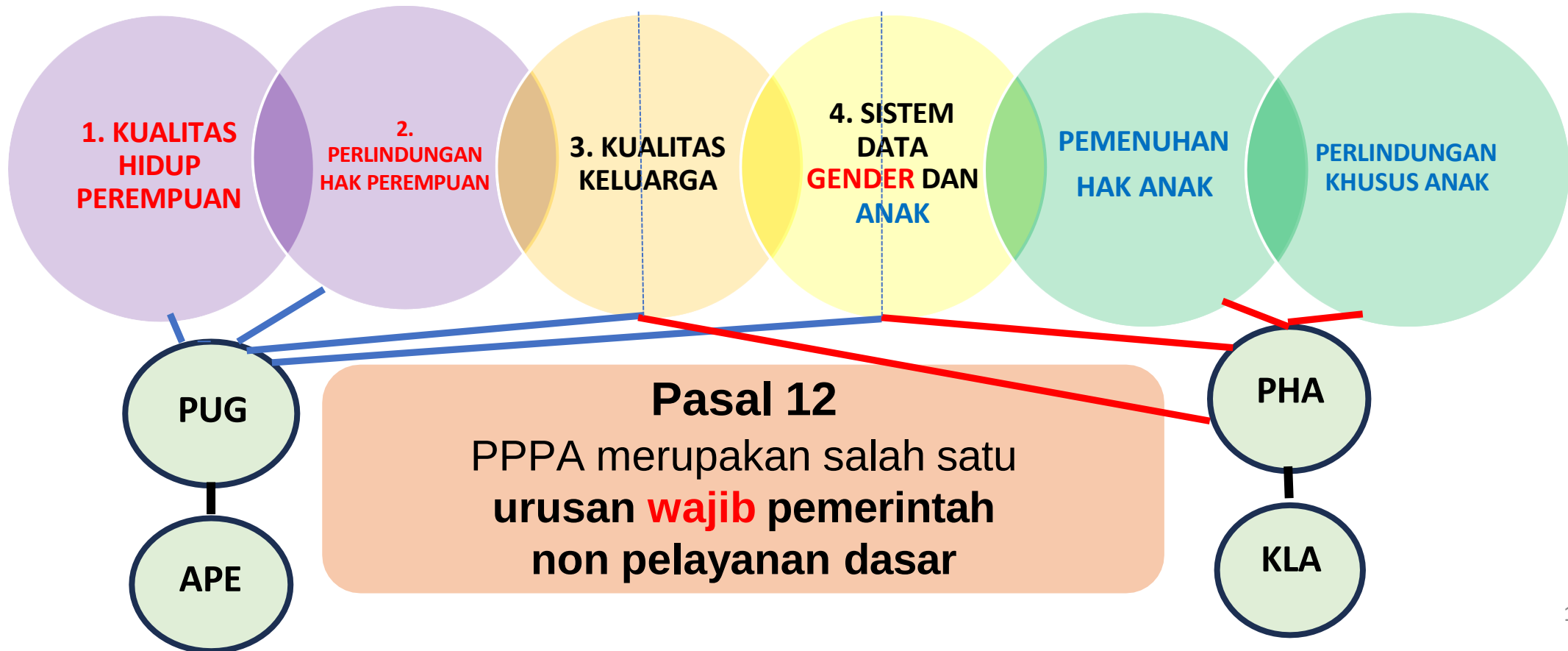


Amanah UU 23/2014



URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

UU No. 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah





UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

1. Kualitas Hidup Perempuan (KHP)

Pusat

- a. Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat nasional

- b. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat nasional

- c. Standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (LPLPP)

Provinsi

- a. Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah provinsi

- b. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi

- c. Penguatan dan pengembangan LPLPP tingkat Daerah provinsi

Kab/Kota

- a. Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah kabupaten/kota

- b. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota

- c. Penguatan dan pengembangan LPLPP tingkat Daerah kabupaten/kota



UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2. PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN

Pusat

a. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup nasional

b. Penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi dan int'l.

c. Standardisasi lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan (LPLPHP)

Provinsi

a. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah prov dan lintas Daerah kab/kota

b. Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah prov dan lintas Daerah kab/kota

c. Penguatan dan pengembangan LPLPHP tingkat Daerah provinsi

Kab/Kota

a. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota

b. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/kota

c. Penguatan dan pengembangan LPLPHP tingkat Daerah kabupaten/kota



UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

3. KUALITAS KELUARGA

Pusat

a. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat nasional.

b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga (LPLPKK) dalam mewujudkan KG dan hak anak tingkat nasional

c. Standardisasi LPLPKK dalam mewujudkan KG dan hak anak

Provinsi

a. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kab/ kota

b. Penguatan dan pengembangan LPLPKK dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas daerah kab/ kota

c. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas daerah kab/kota

Kab/Kota

a. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak tingkat daerah kab/kota

b. Penguatan dan pengembangan LPLPKK dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kab/kota

c. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kab/kota



UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pusat

- a. Penetapan sistem data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat nasional

Provinsi

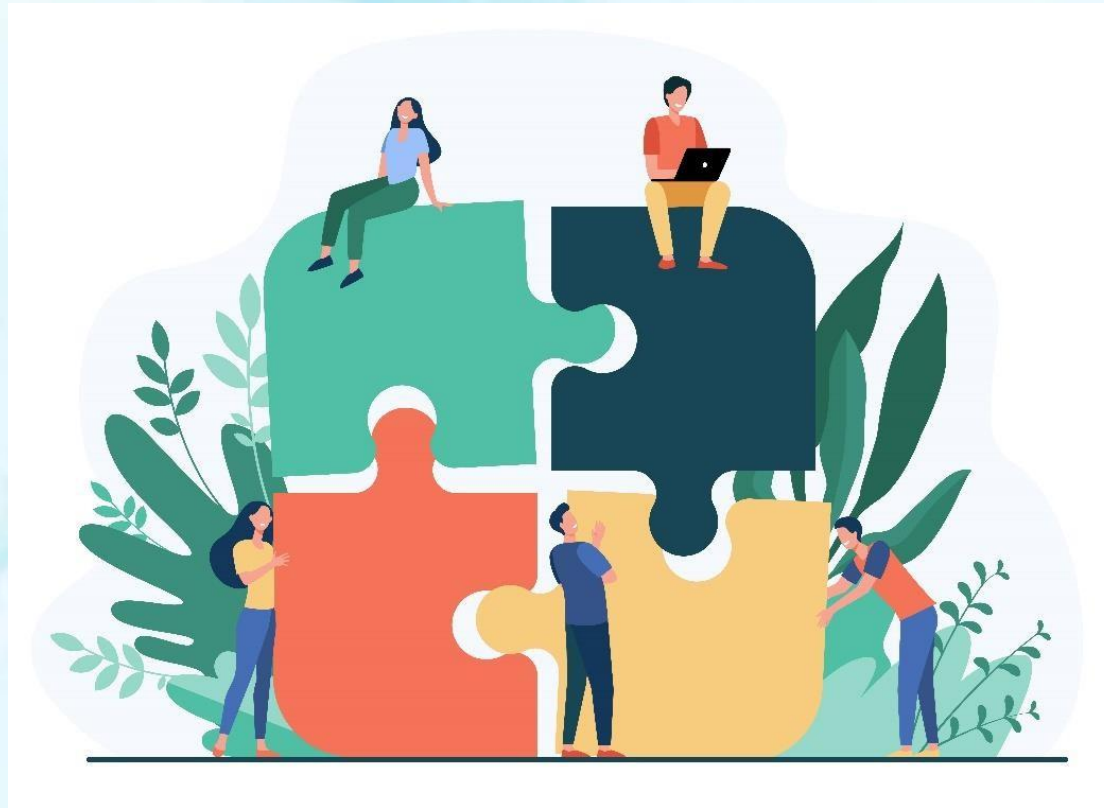
- a. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah provinsi

Kab/Kota

- a. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah kabupaten/kota

- b. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat nasional.

4. SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

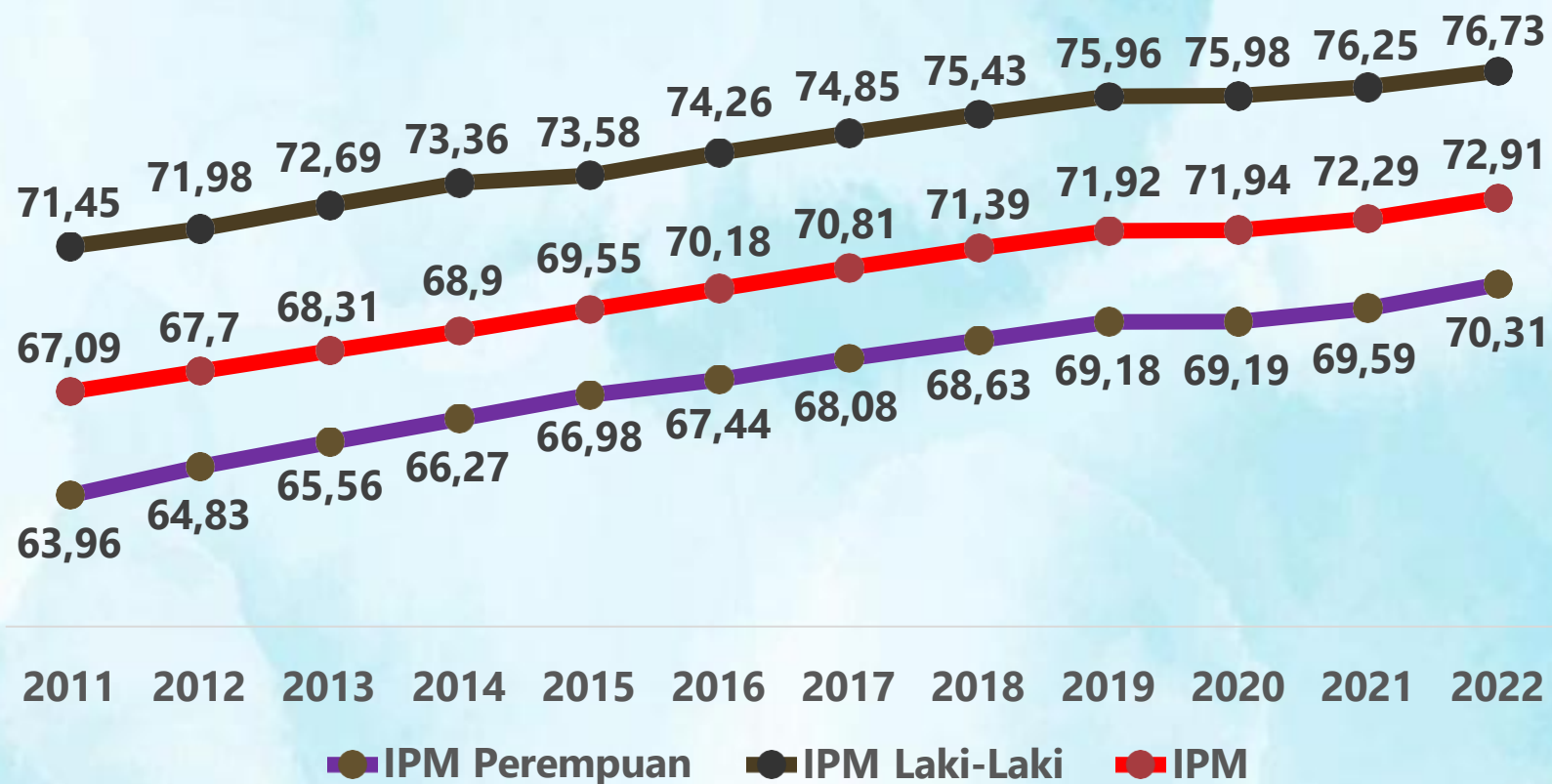


2. MENGUKUR “PUG”



Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Tahun 2011-2022



IPM Perempuan masih **berstatus sedang**, sedangkan IPM laki-laki sudah berstatus tinggi □ kualitas SDM perempuan < laki-laki.

Rendahnya IPM Perempuan berkontribusi terhadap rendahnya IPM nasional.

Diukur dengan:

1. Angka Harapan Hidup (SDG 3)
2. Harapan Lama Sekolah (SDG 4.3)
3. Rata2 Lama Sekolah (SDG 4.4)
4. Pengeluaran Per Kapita (SDG 8.5)

IPM Indonesia 2021:

- Ranking 107 dari 189 Negara
- Ranking 6 dari 10 Negara ASEAN
- Ranking 17 dari 19 Negara G20
- Ranking 5 dari 5 Negara MIKTA



IPM 2023

JAWA TIMUR

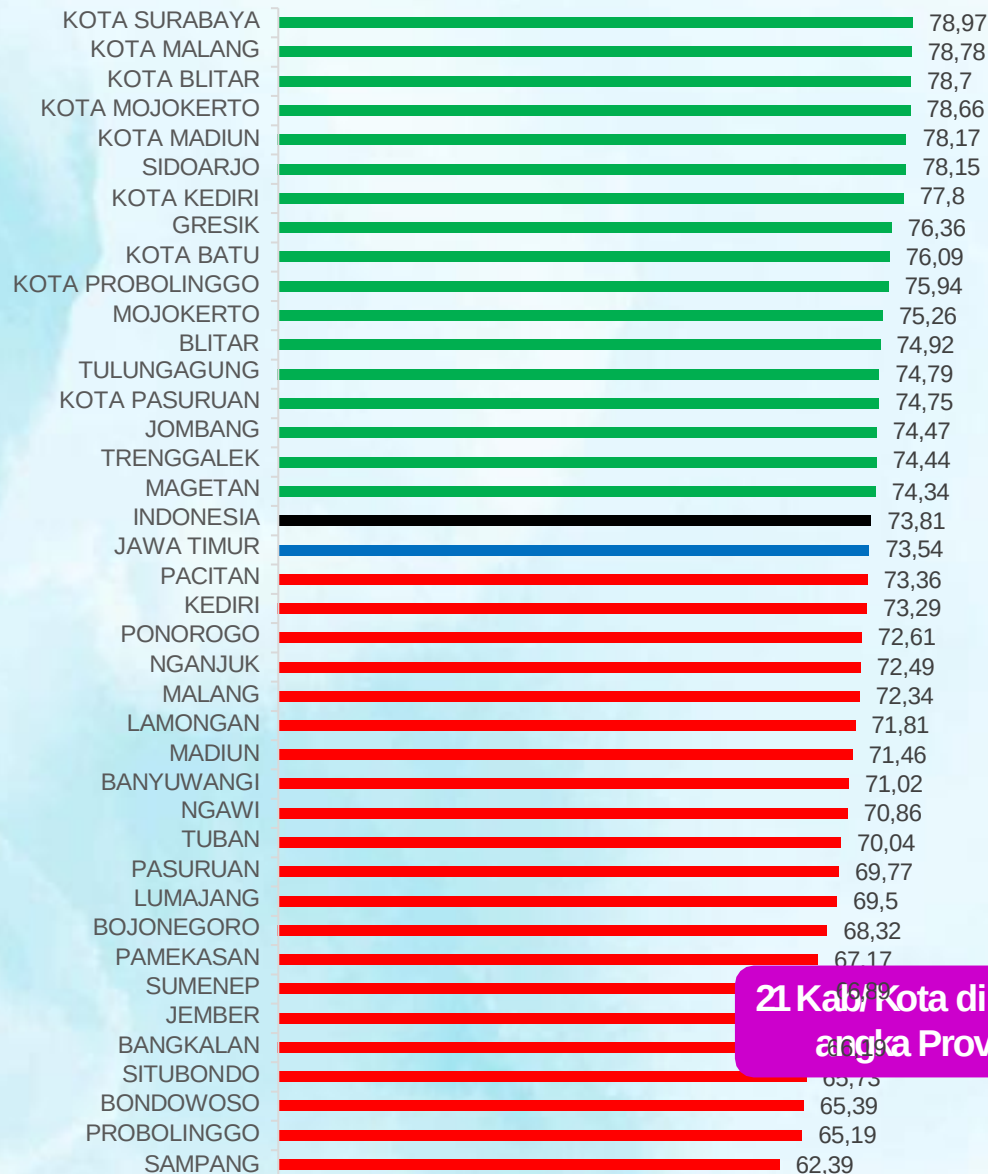
PR bagi 21 Kab/Kota

yang memiliki IPM **di bawah**
IPM Provinsi:

1. Pacitan
2. Kediri
3. Ponorogo
4. Nganjuk
5. Malang
6. Lamongan
7. Madiun
8. Banyuwangi
9. Ngawi
10. Tuban
11. Pasuruan
12. Lumajang
13. Bojonegoro
14. Pamekasan
15. Sumenep
16. Jember
17. Bangkalan
18. Situbondo
19. Bondowoso
20. Probolinggo
21. Sampang

Fokus kebijakan, program dan
kegiatan, pada OPD-OPD yang
menangani:

1. PENDIDIKAN
2. KESEHATAN
3. EKONOMI



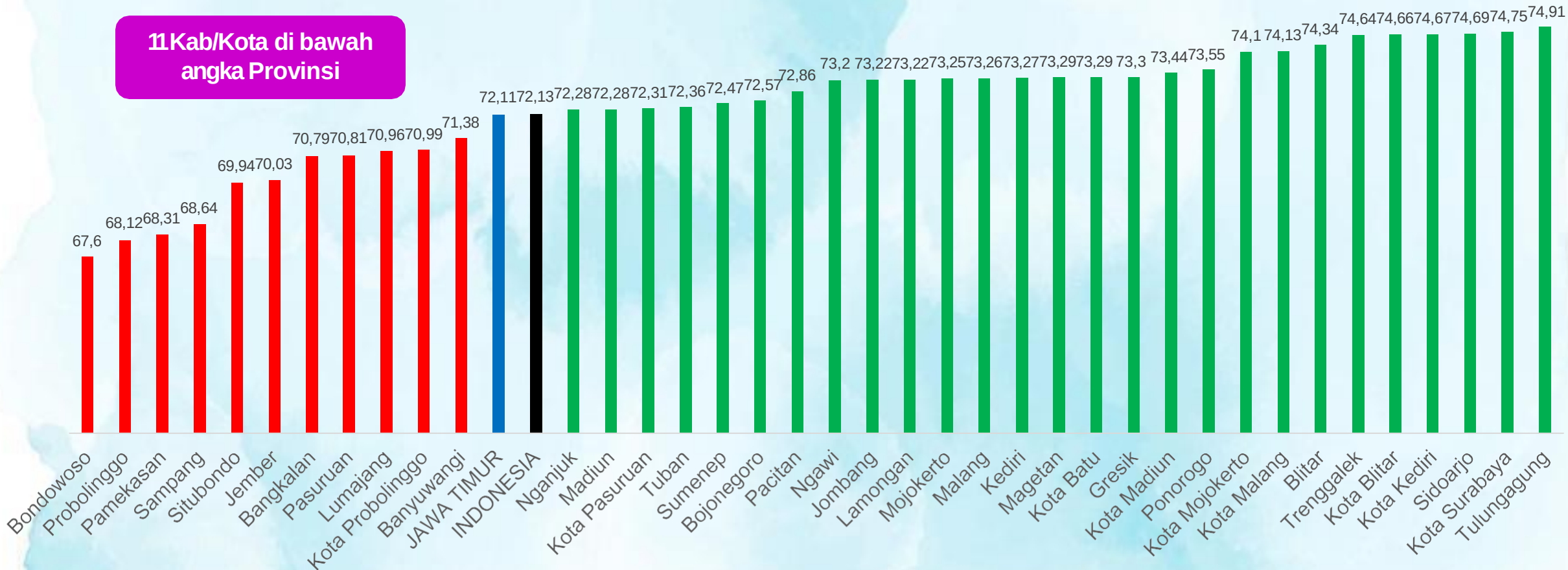
21 Kab/Kota di bawah
angka Provinsi



USIA HARAPAN HIDUP

PROVINSI JAWA TIMUR, TAHUN 2023

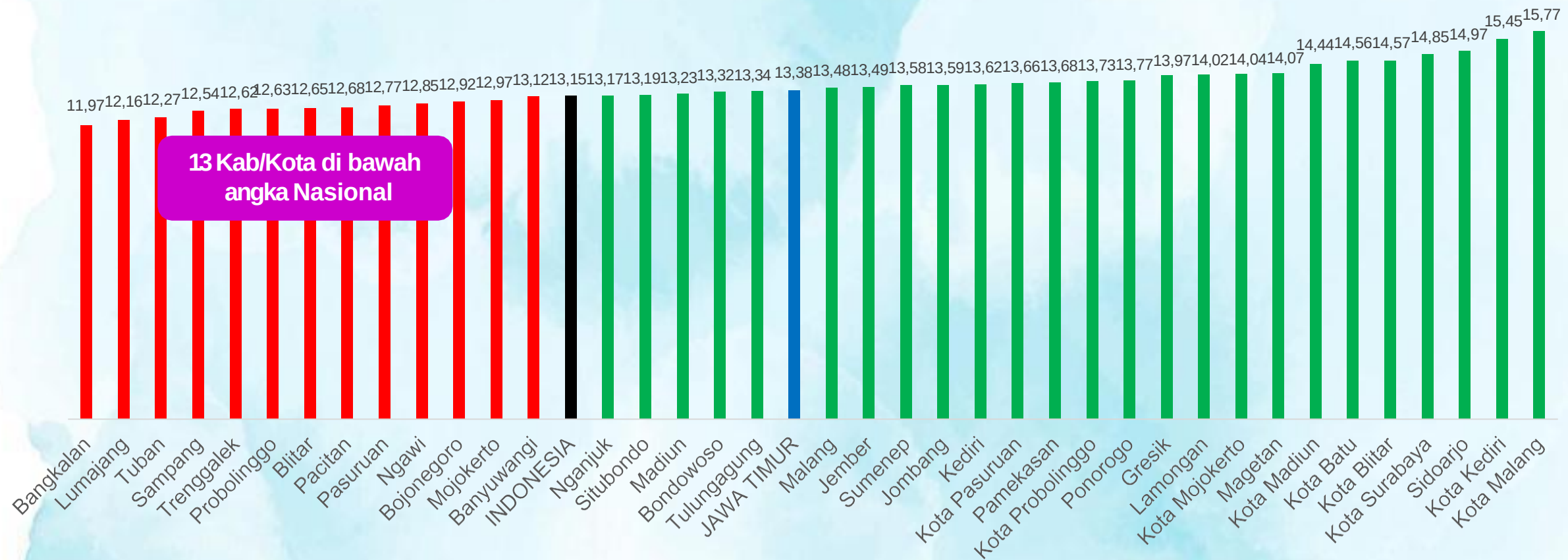
11 Kab/Kota di bawah
angka Provinsi



Sumber: BPS, 2024



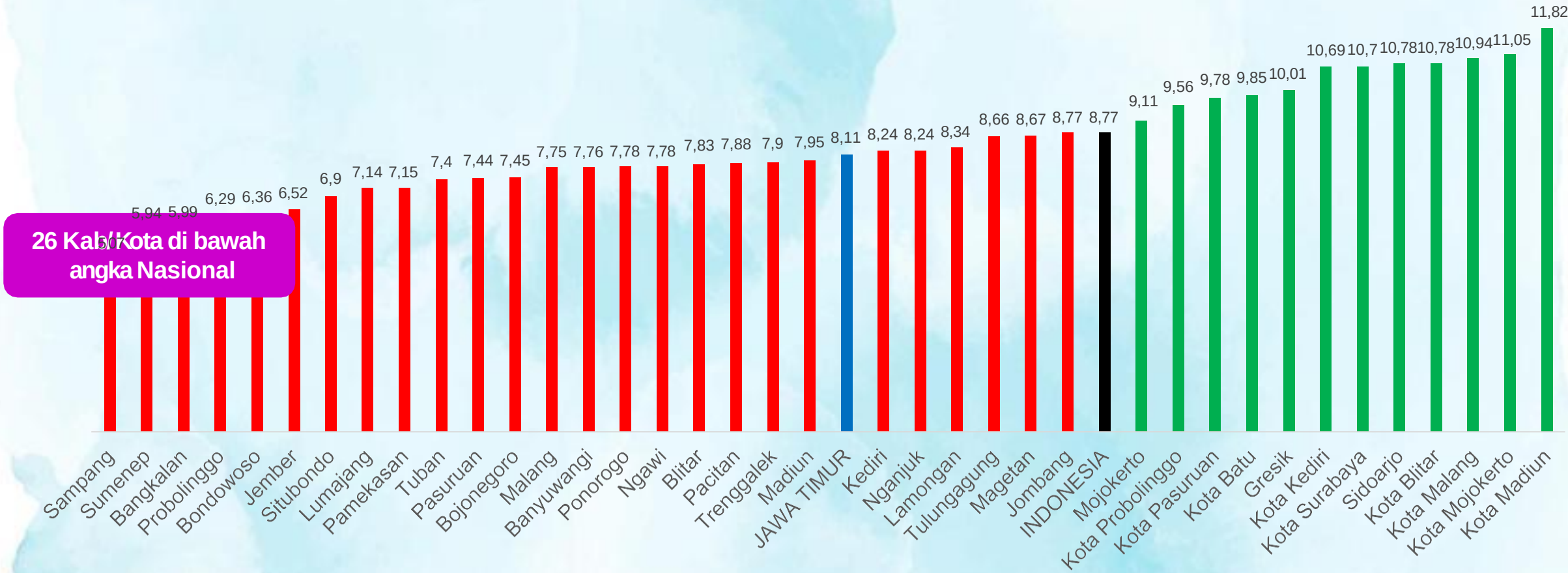
HARAPAN LAMA SEKOLAH PROVINSI JAWA TIMUR, TAHUN 2023



Sumber: BPS, 2024



RATA-RATA LAMA SEKOLAH PROVINSI JAWA TIMUR, TAHUN 2023



Sumber: BPS, 2024



PENGELUARAN PER KAPITA

PROVINSI JAWA TIMUR, TAHUN 2023



Sumber: BPS, 2024



Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Tahun 2011-2022



Diukur dari Rasio IPM L/IPM P:

1. KESEHATAN

- Angka Harapan Hidup (SDG 3)

2. PENDIDIKAN

- Harapan Lama Sekolah (SDG 4.3)
- Rata2 Lama Sekolah (SDG 4.4)

3. EKONOMI

- Pengeluaran Per Kapita (SDG 8.5)

IPG Indonesia 2021:

- Masuk dalam Medium Human Development (Group 3)
- Ranking 9 dari 10 Negara ASEAN
- Ranking 16 dari 19 Negara G20
- Ranking 4 dari 5 Negara MIKTA



IPG 2022

JAWA TIMUR

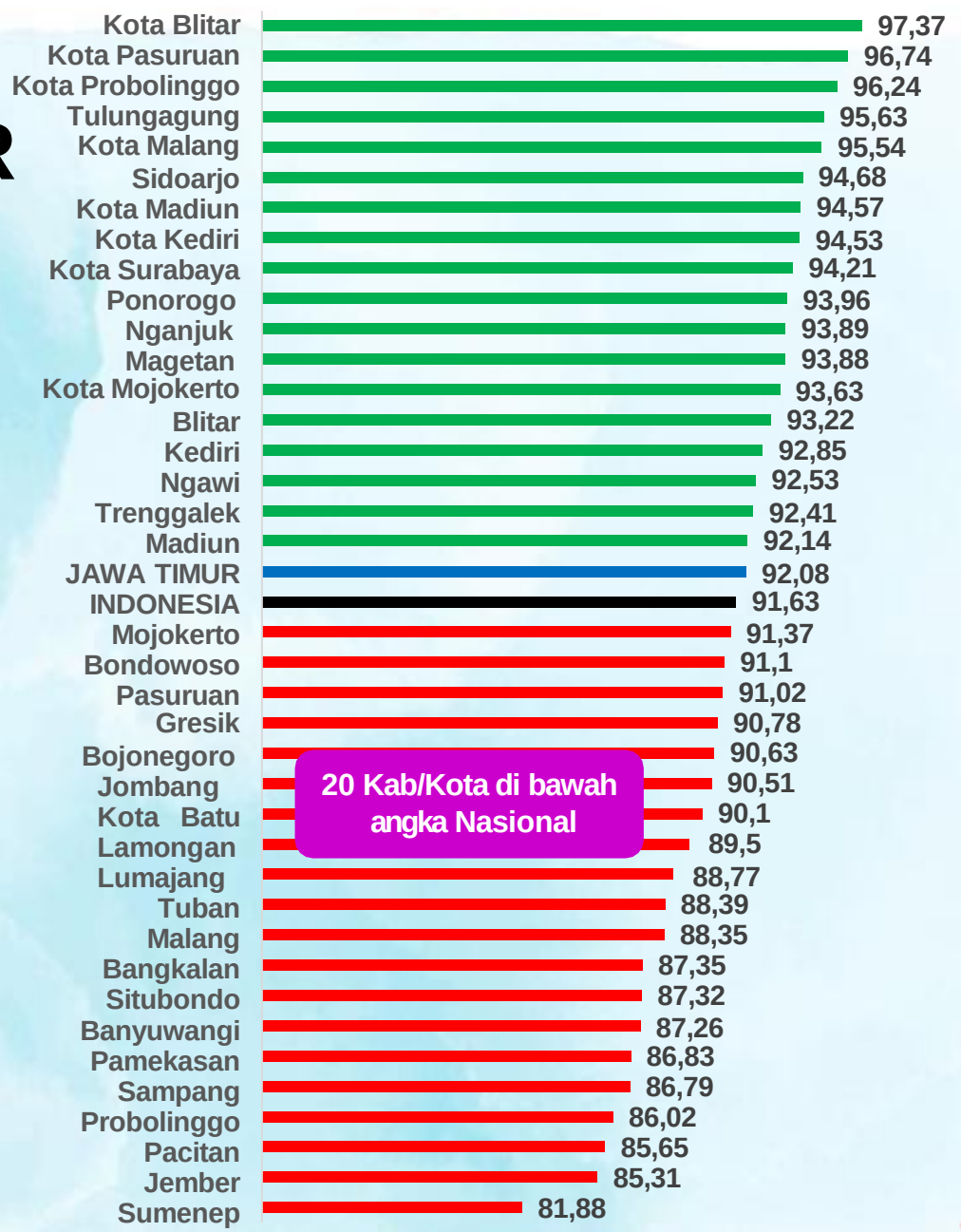
PR bagi 20 kab

yang memiliki IPG **di bawah**
IPG Provinsi:

1. Mojokerto
2. Bondowoso
3. Pasuruan
4. Gresik
5. Bojonegoro
6. Jombang
7. Kota Batu
8. Lamongan
9. Lumajang
10. Tuban
11. Malang
12. Bangkalan
13. Situbondo
14. Banyuwangi
15. Pamekasan
16. Sampang
17. Probolinggo
18. Pacitan
19. Jember
20. Sumenep

Fokus kebijakan, program dan
kegiatan, pada OPD-OPD yang
menangani:

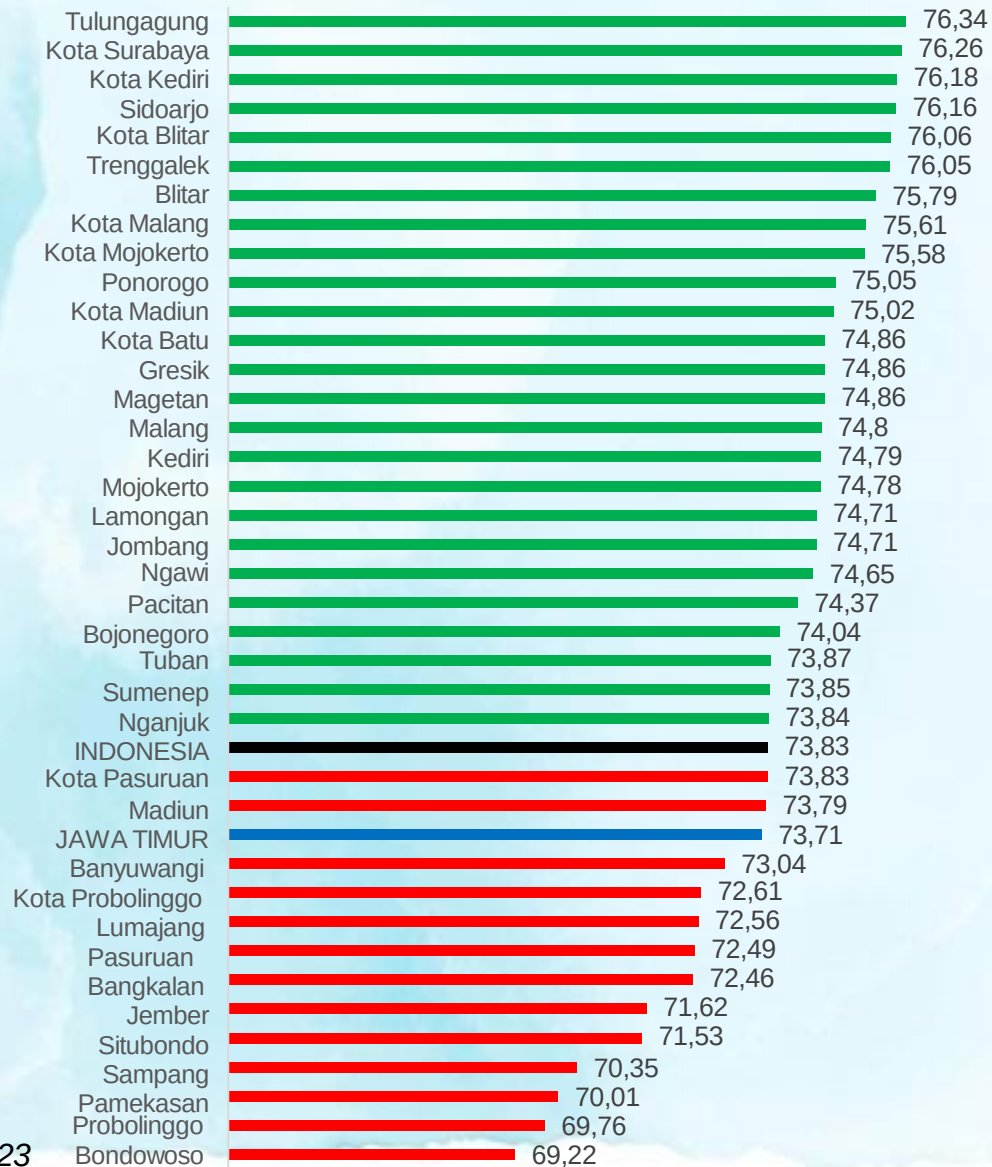
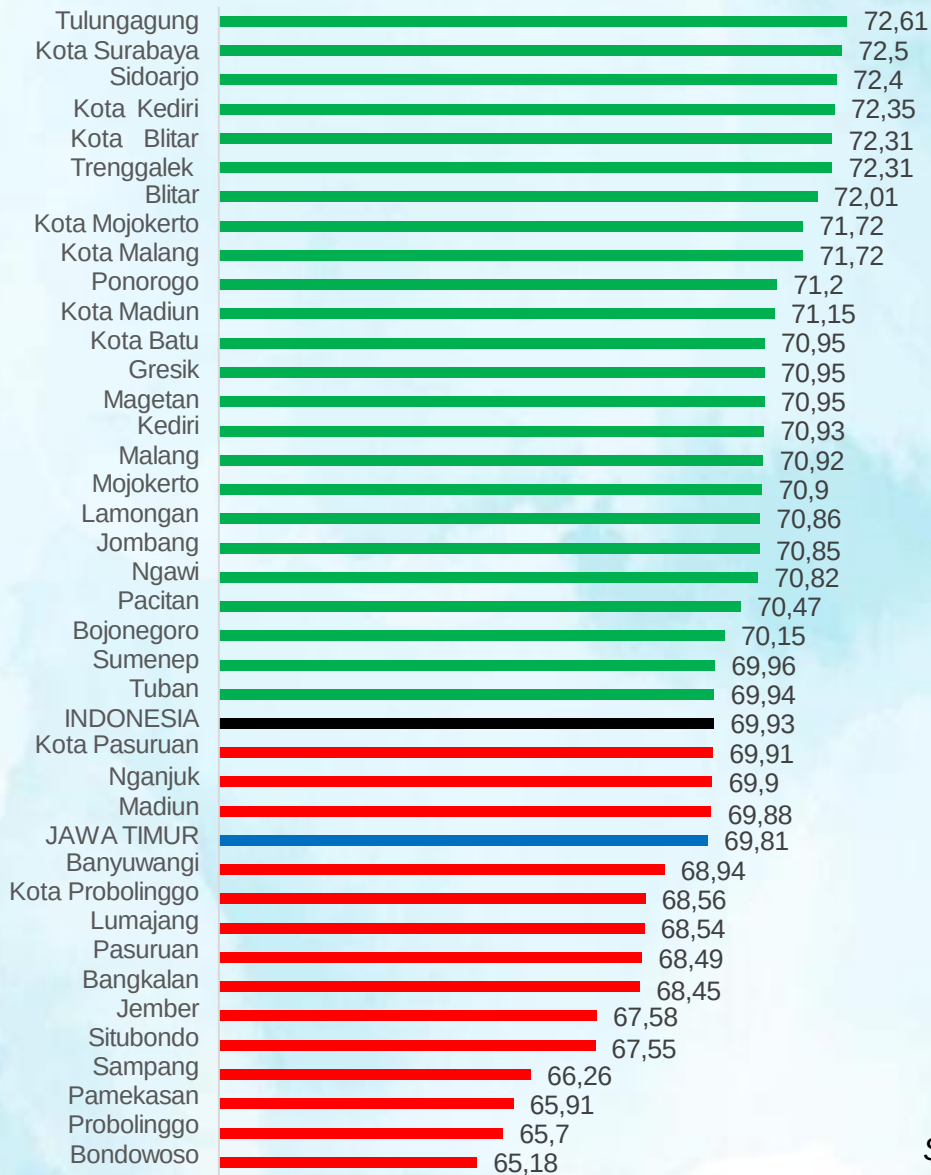
1. PENDIDIKAN
2. KESEHATAN
3. EKONOMI



20 Kab/Kota di bawah
angka Nasional



Angka Harapan Hidup, Provinsi JAWA TIMUR, Tahun 2022

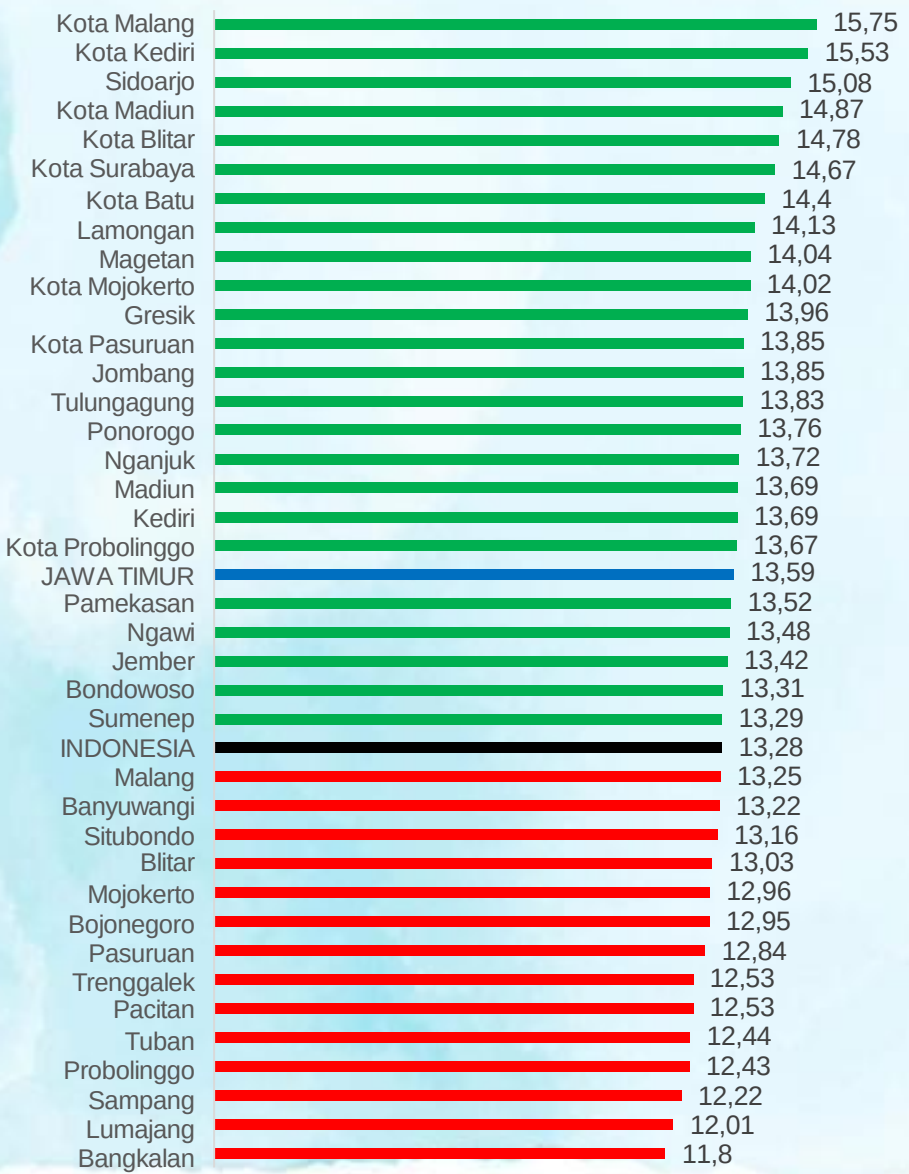
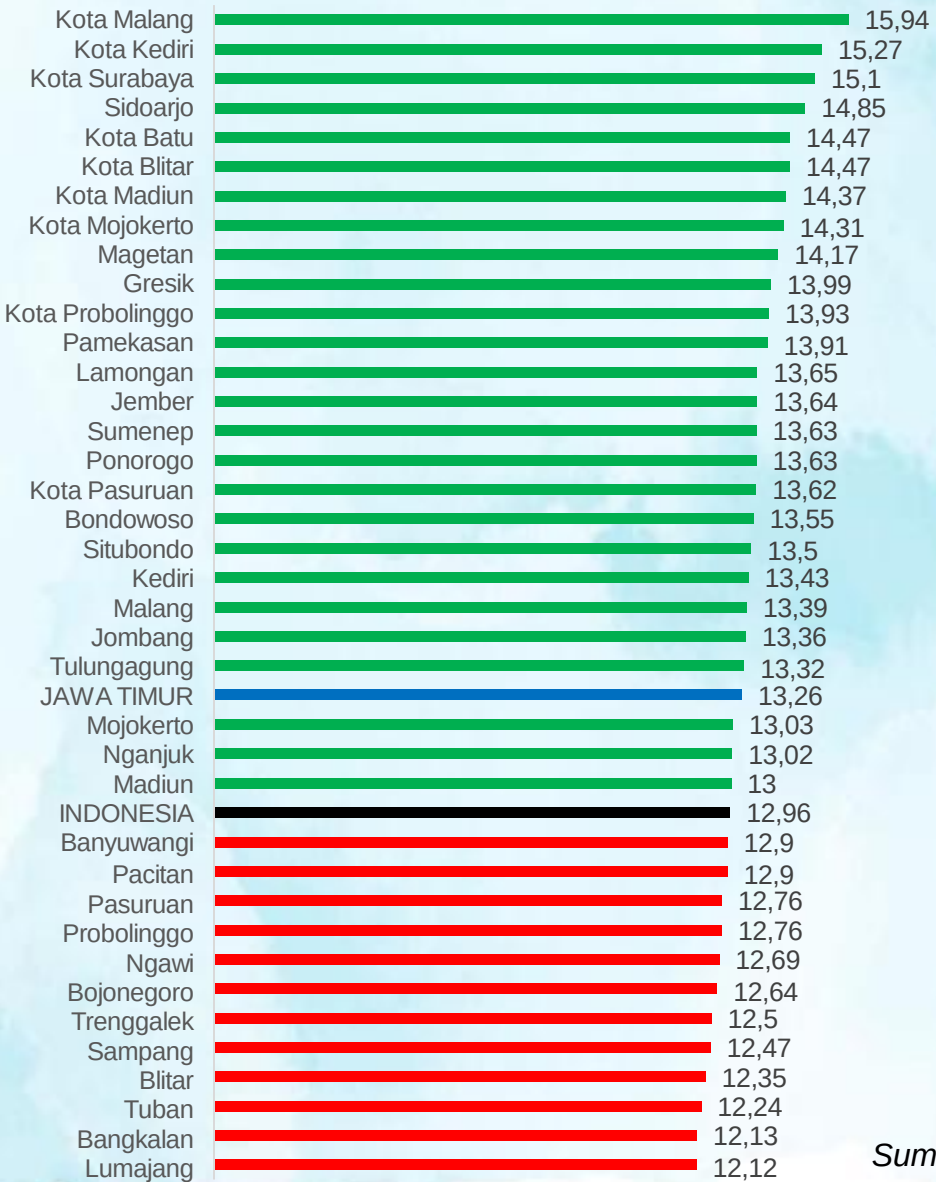


Sumber: BPS, 2023



Harapan Lama Sekolah

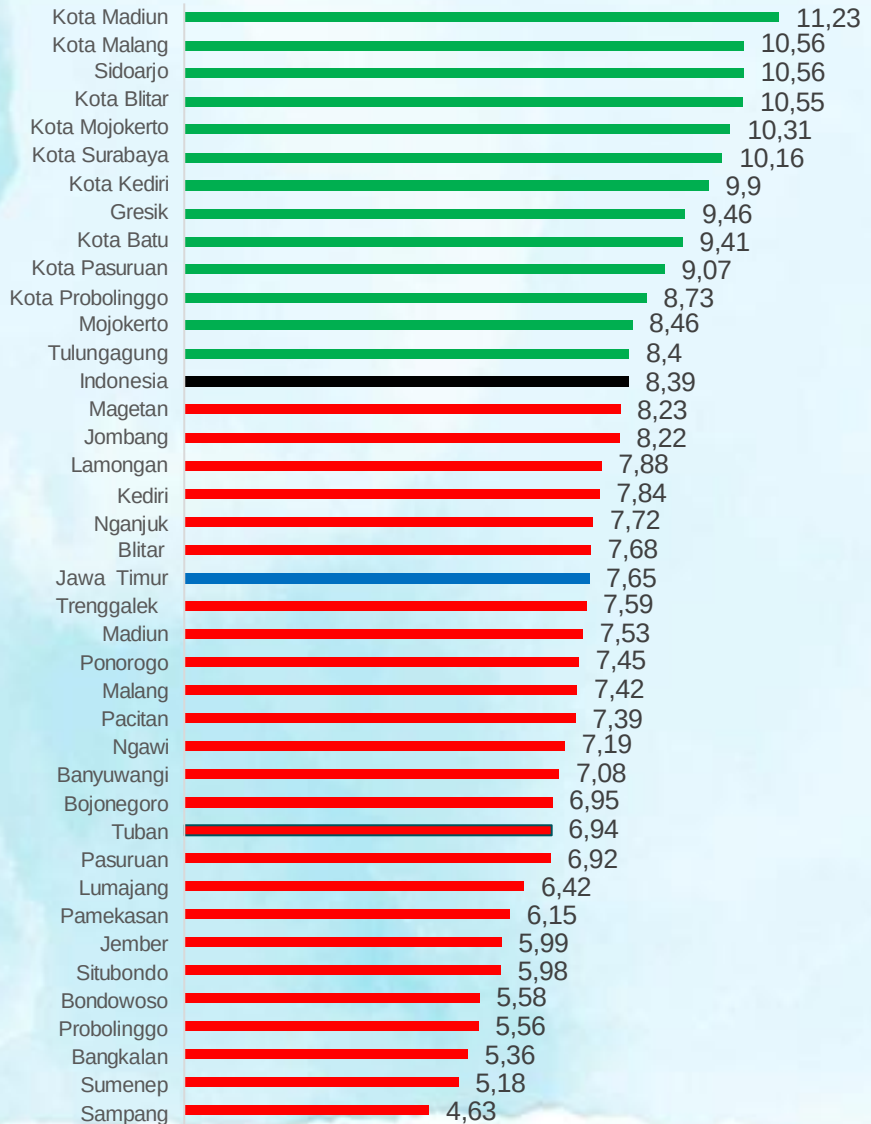
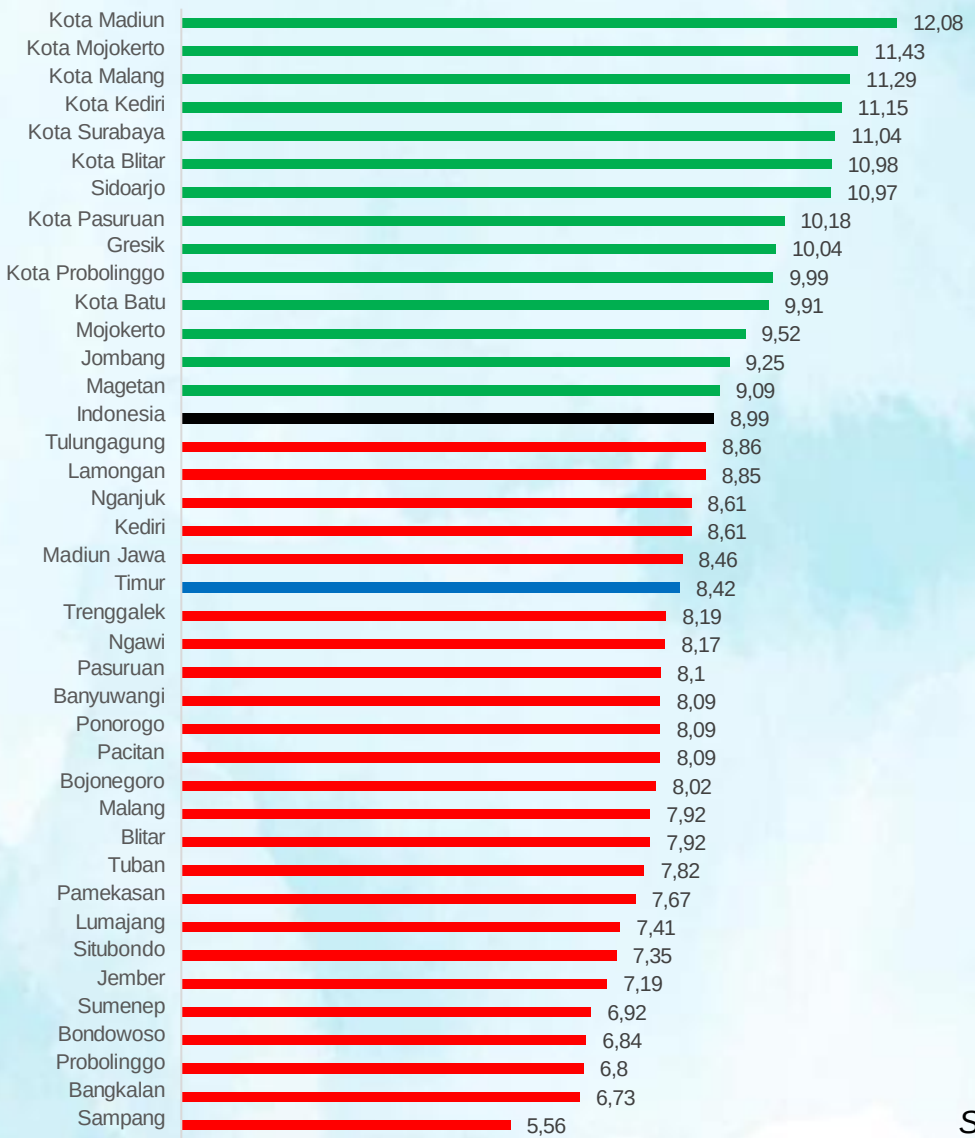
Provinsi JAWA TIMUR, Tahun 2022



Sumber: BPS, 2023



Rata-rata Lama Sekolah, Provinsi JAWA TIMUR Tahun 2022

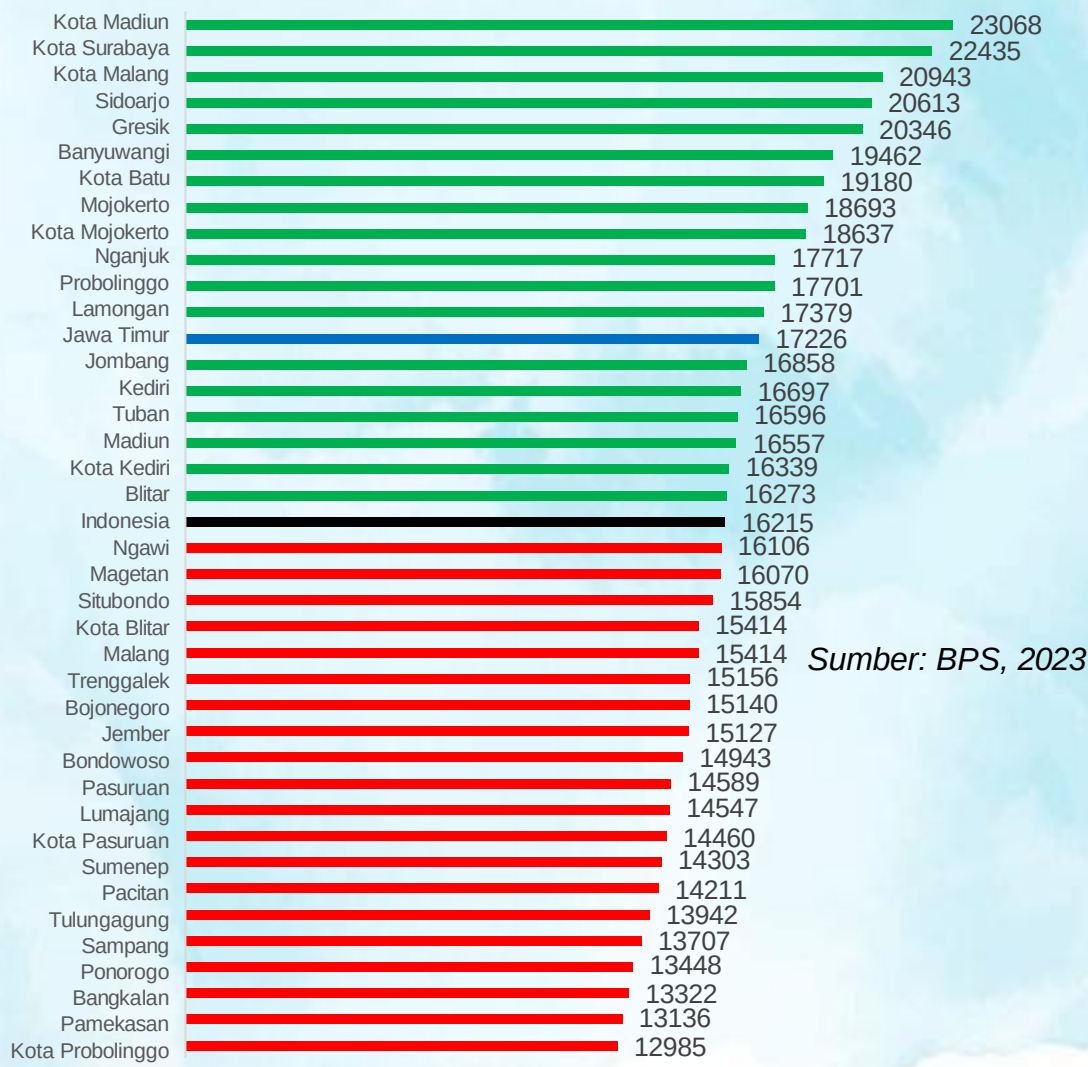


Sumber: BPS, 2023

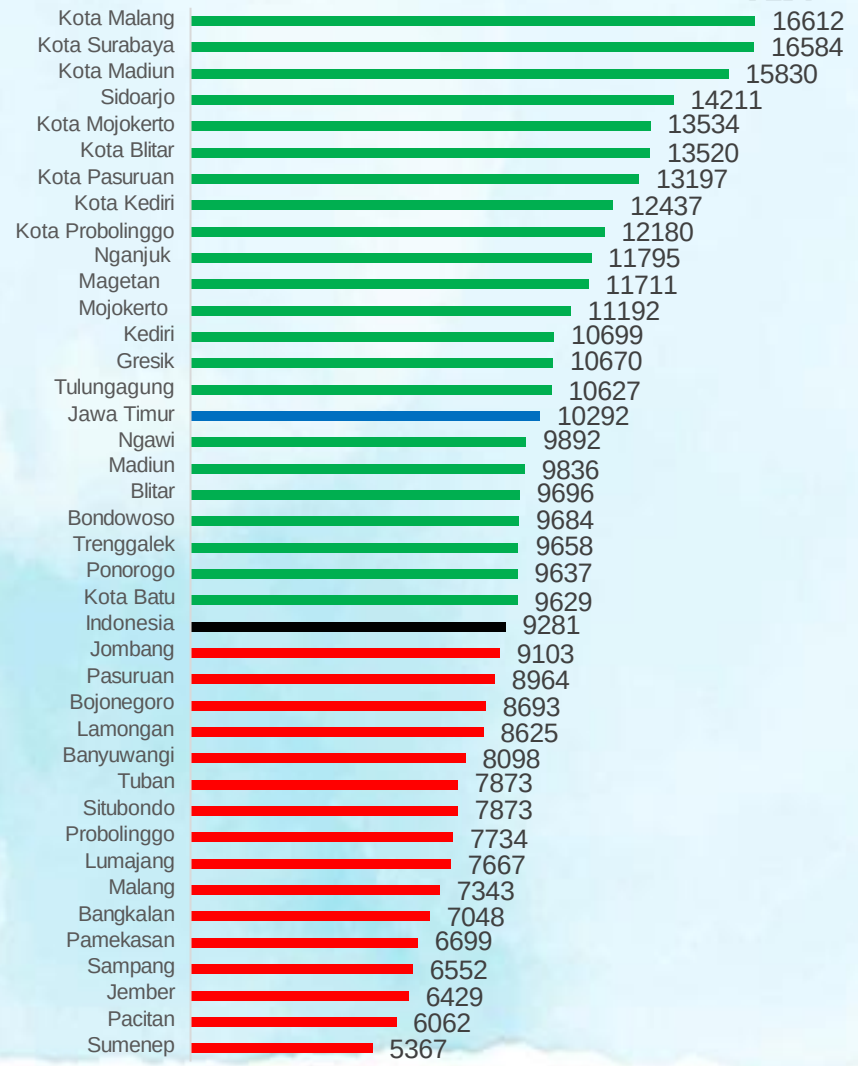


PENGELUARAN PER KAPITA (Ribu Rupiah/Org/Th)

Provinsi JAWA TIMUR, TAHUN 2022



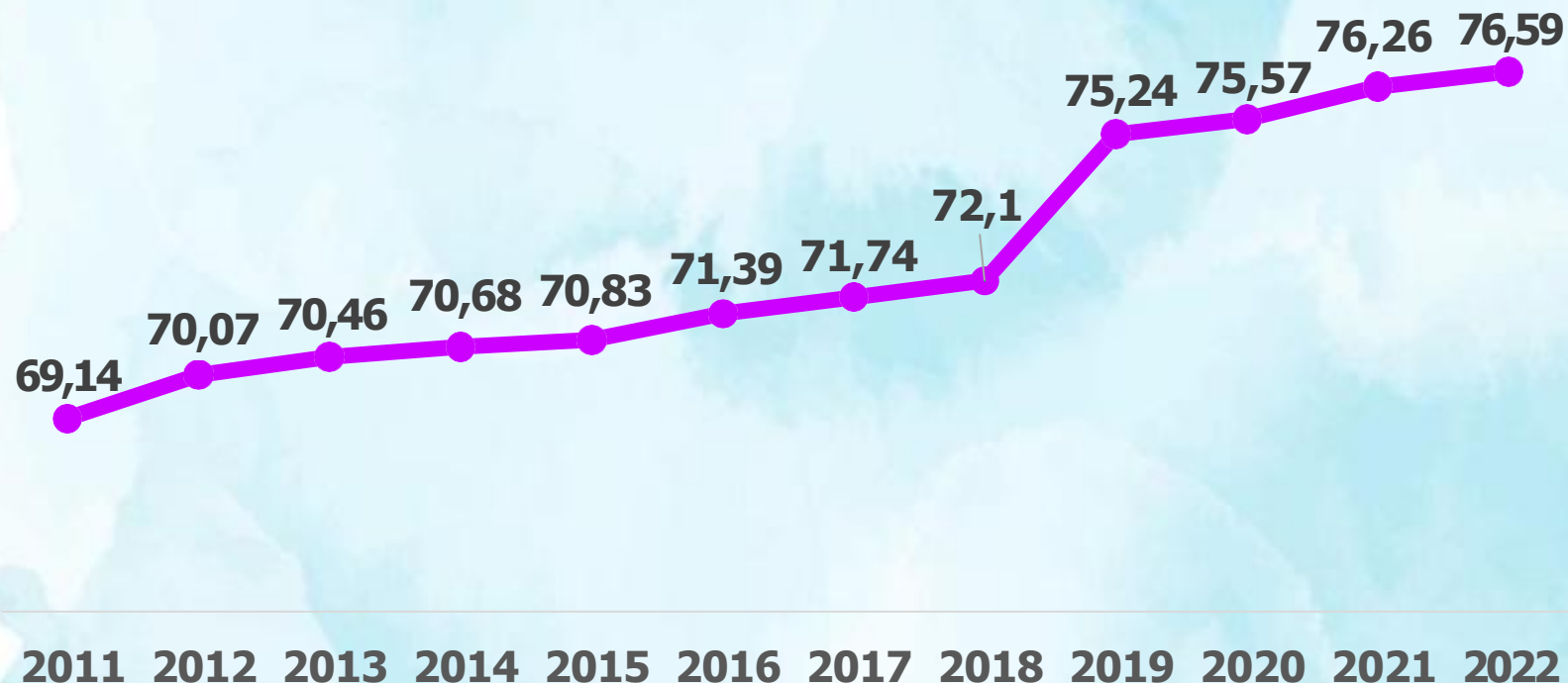
Sumber: BPS, 2023





Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Tahun 2011-2022



Diukur dengan:

1. Angka Partisipasi Perempuan di Parlemen
2. Perempuan sebagai Tenaga Profesional
3. Sumbangan Pendapatan Perempuan

- Adanya kenaikan IPG karena meningkatnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif.
- Variabel sumbangan pendapatan perempuan dan perempuan sebagai tenaga profesional masih rendah.



IDG 2022

JAWA TIMUR

PR bagi 31 kab/kota

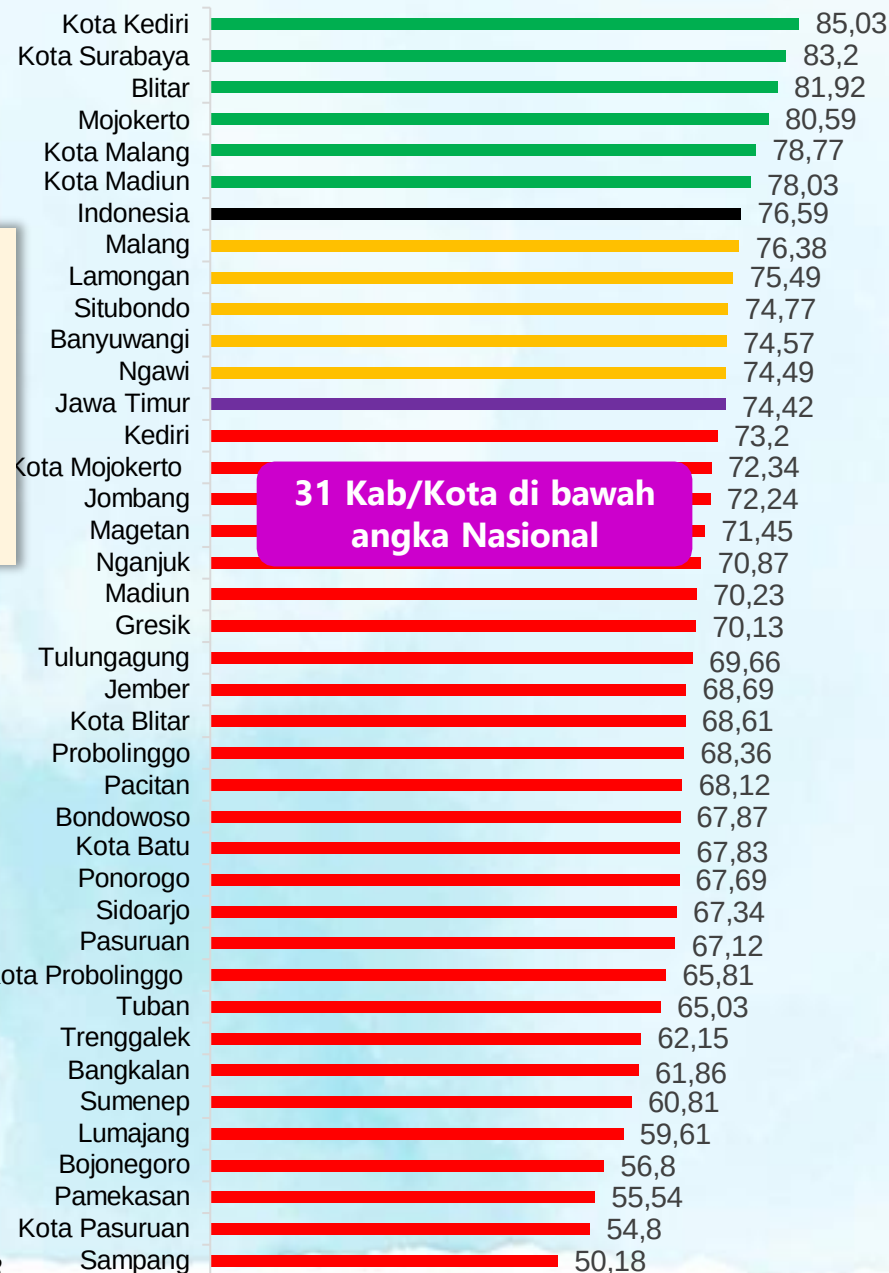
yang memiliki IDG **di bawah**
IDG Nasional:

1. Kediri
2. Kota Mojokerto
3. Jombang
4. Magetan
5. Nganjuk
6. Madiun
7. Gresik
8. Tulungagung
9. Jember
10. Kota Blitar
11. Probolinggo
12. Pacitan
13. Malang
14. Lamongan
15. Situbondo
16. Banyuwangi

17. Kota Batu
18. Ponorogo
19. Sidoarjo
20. Pasuruan
21. Kota Probolinggo
22. Tuban
23. Trenggalek
24. Bangkalan
25. Sumenep
26. Lumajang
27. Bojonegoro
28. Pamekasan
29. Kota Pasuruan
30. Sampang
31. Ngawi

Fokus kebijakan, program dan kegiatan,
pada OPD-OPD yang menangan:

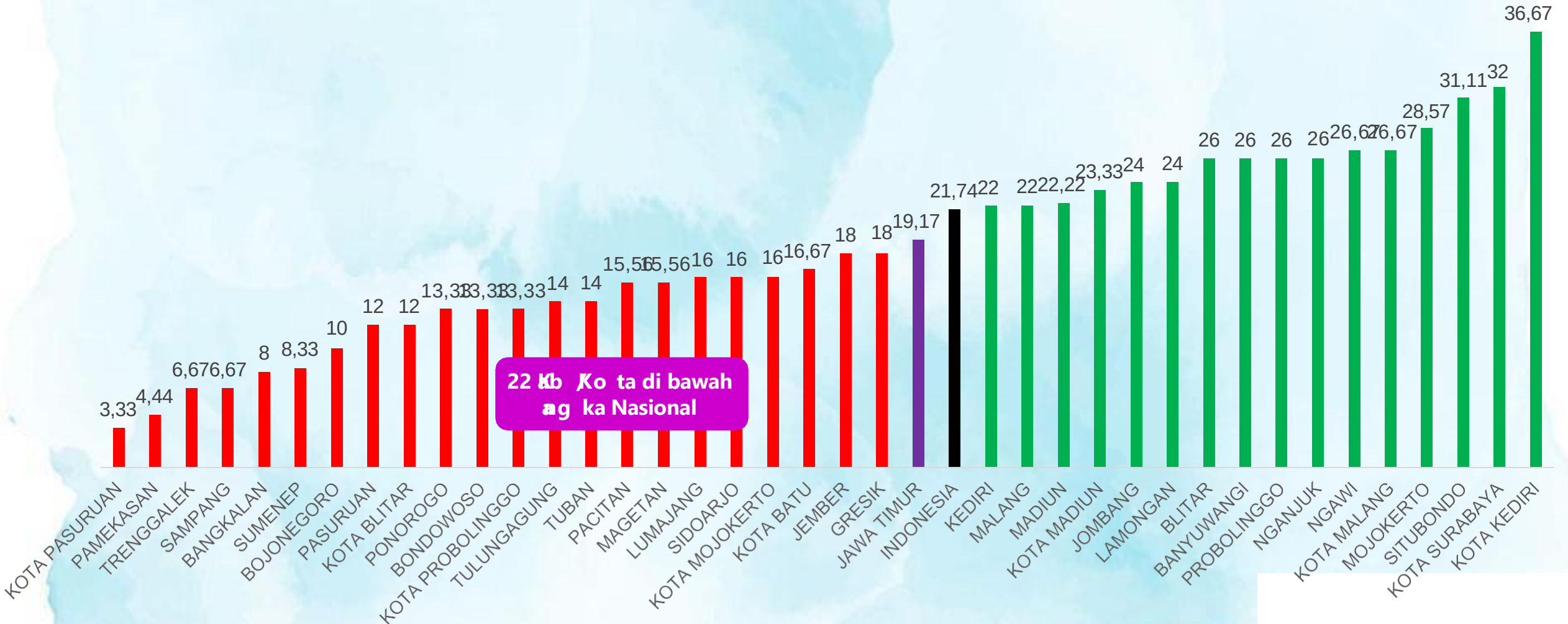
1. POLITIK
2. PENGAMBILAN KEPUTUSAN
- KEPEMIMPINAN
3. EKONOMI



31 Kab/Kota di bawah
angka Nasional



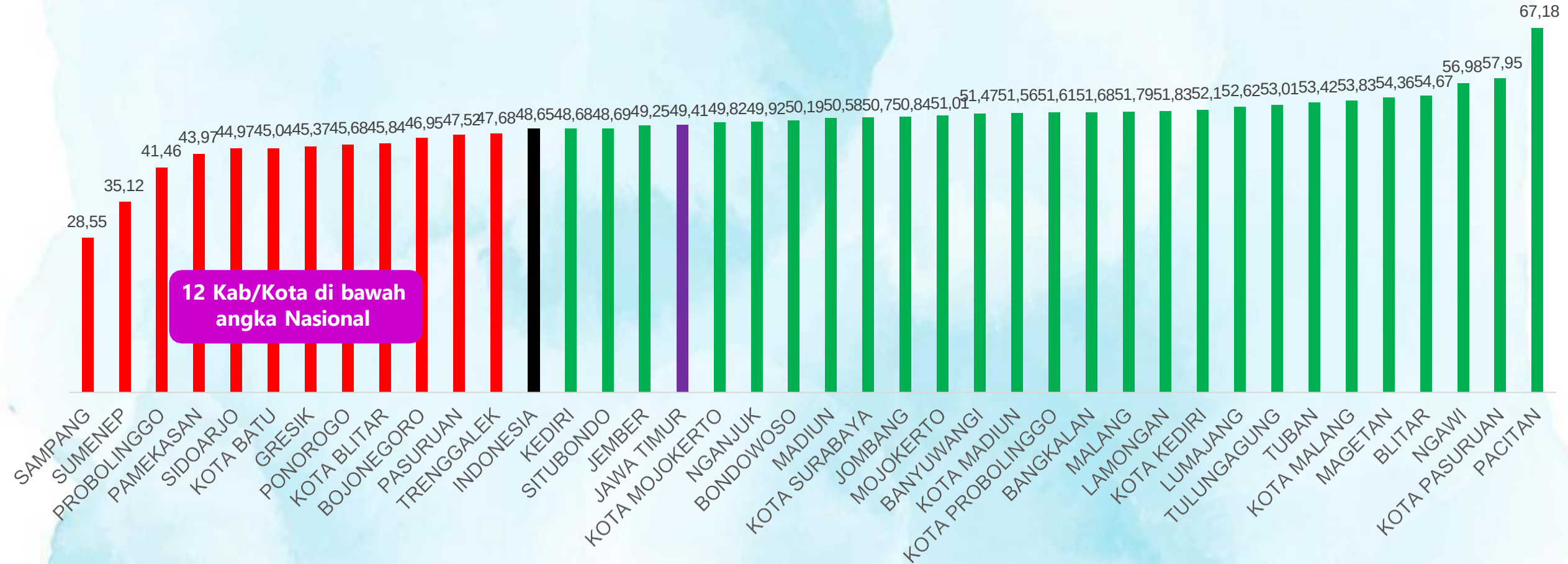
Angka Partisipasi Perempuan di Parlemen Provinsi JAWA TIMUR, Tahun 2022



Sumber: BPS, 2023



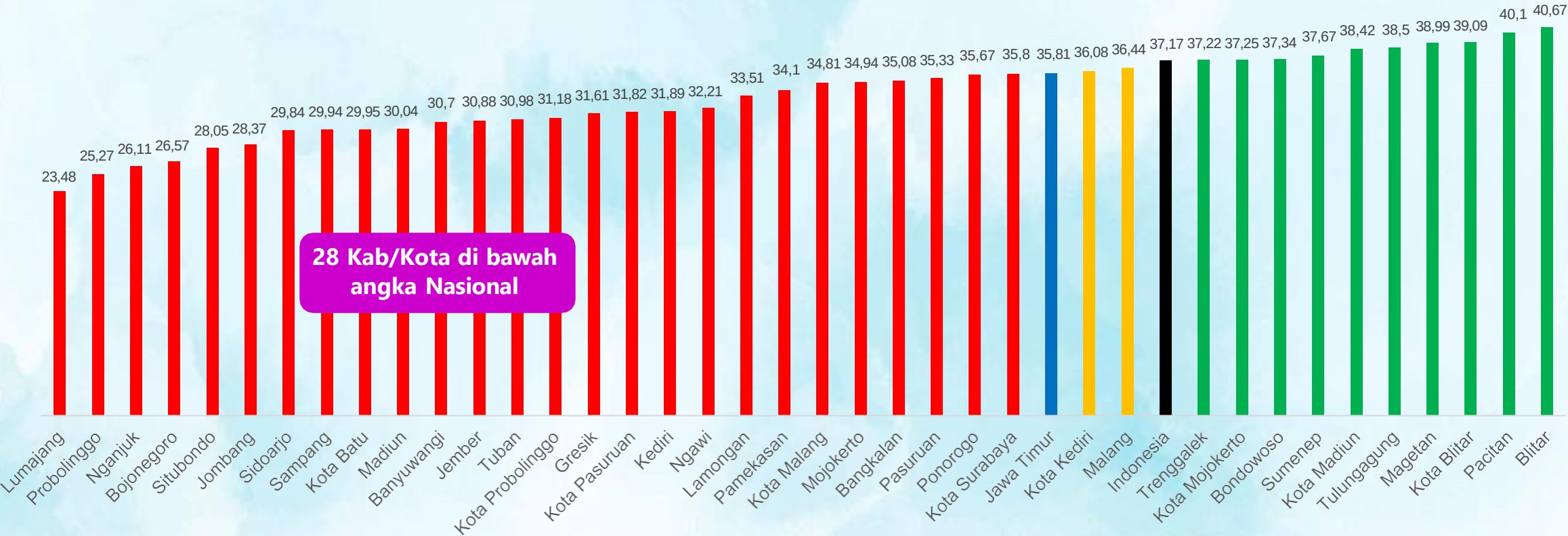
Perempuan sebagai Tenaga Profesional Provinsi JAWA TIMUR, Tahun 2022



Sumber: BPS, 2023



SUMBANGAN PENDAPATAN PEREMPUAN PROVINSI JAWA TIMUR, TAHUN 2022



Sumber: BPS, 2023



Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Tahun 2019-2022

2019;
0,488

2020;
0,472

2021;
0,465

2022;
0,459

2019

2020

2021

2022

Diukur dengan:

- KESEHATAN: Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran) (SDG 3.1)
- KB/PERKAWINAN ANAK: Angka Kelahiran Remaja (kelahiran per 1000 remaja usia 15-19 th) (SDG 3.7)
- POLITIK: Partisipasi Perempuan dlm Parlemen (SDG 5.5)
- PENDIDIKAN: Penduduk dengan Pendidikan Menengah (L/P usia >25th) (SDG 4.4)
- KETENAGAKERJAAN: TPAK (L/P)

IKG Indonesia 2022:

- Ranking 110 dari 191 Negara
- Ranking 7 dari 10 Negara ASEAN
- Ranking 18 dari 19 Negara G20
- Ranking 5 dari 5 Negara MIKTA



IKG 2022

JAWA TIMUR

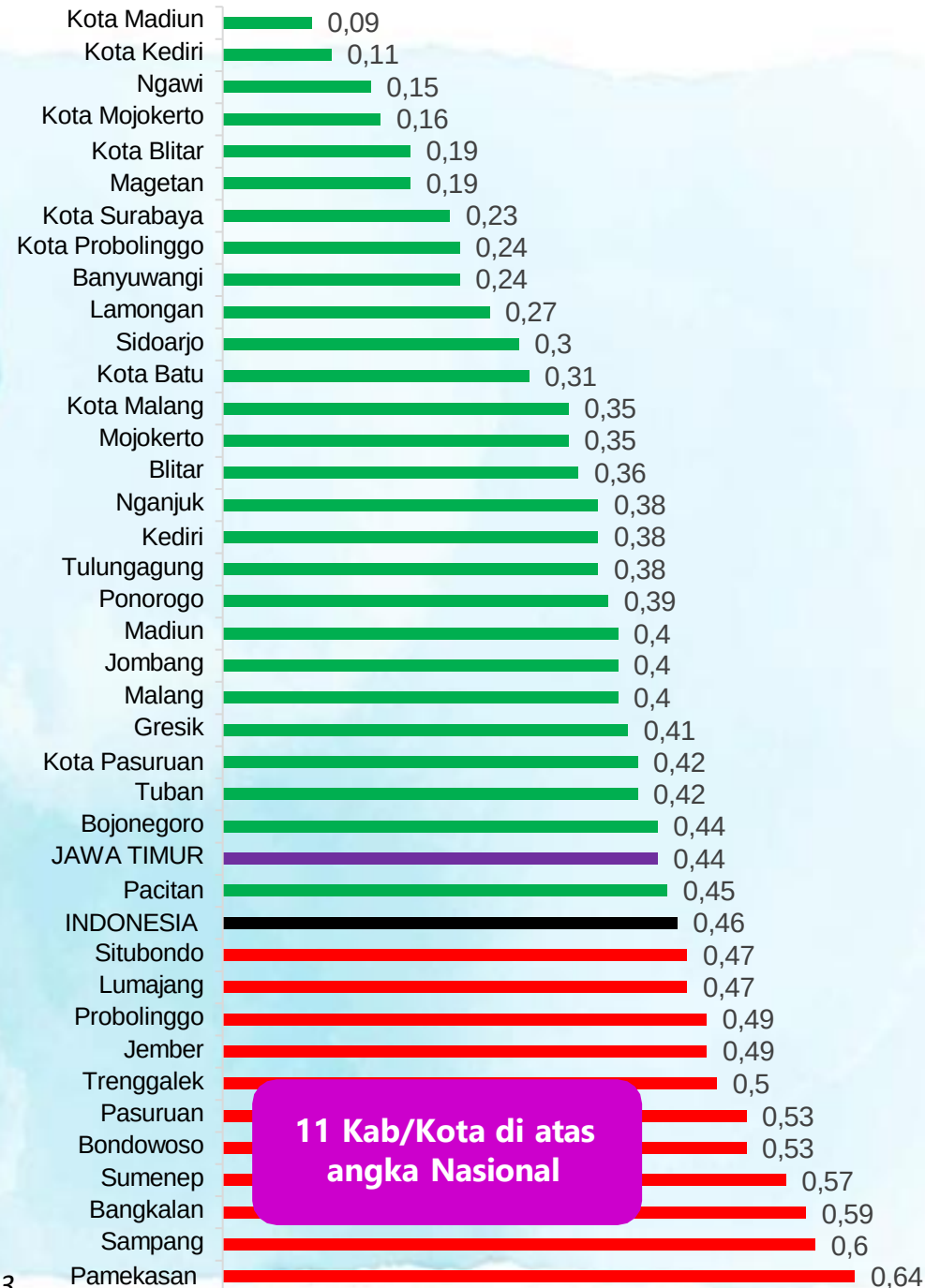
PR bagi 11 kab/kota

yang memiliki IKG **di atas**
IKG Nasional:

1. Pamekasan
2. Sampang
3. Bangkalan
4. Sumenep
5. Bondowoso
6. Pasuruan
7. Trenggalek
8. Jember
9. Probolinggo
10. Lumajang
11. Situbondo

Fokus kebijakan, program dan kegiatan,
pada OPD-OPD yang menangani:

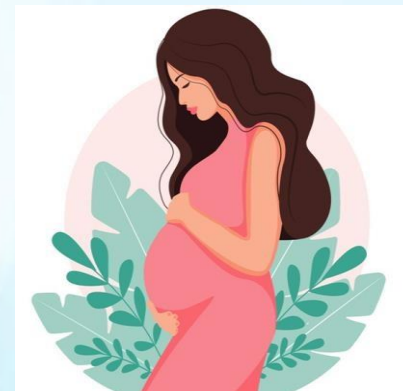
1. KESEHATAN
2. POLITIK
3. ENDIDIKAN
4. EKONOMI



11 Kab/Kota di atas
angka Nasional



ANGKA KEMATIAN IBU MELAHIRKAN (PER 100.000 KELAHIRAN HIDUP)



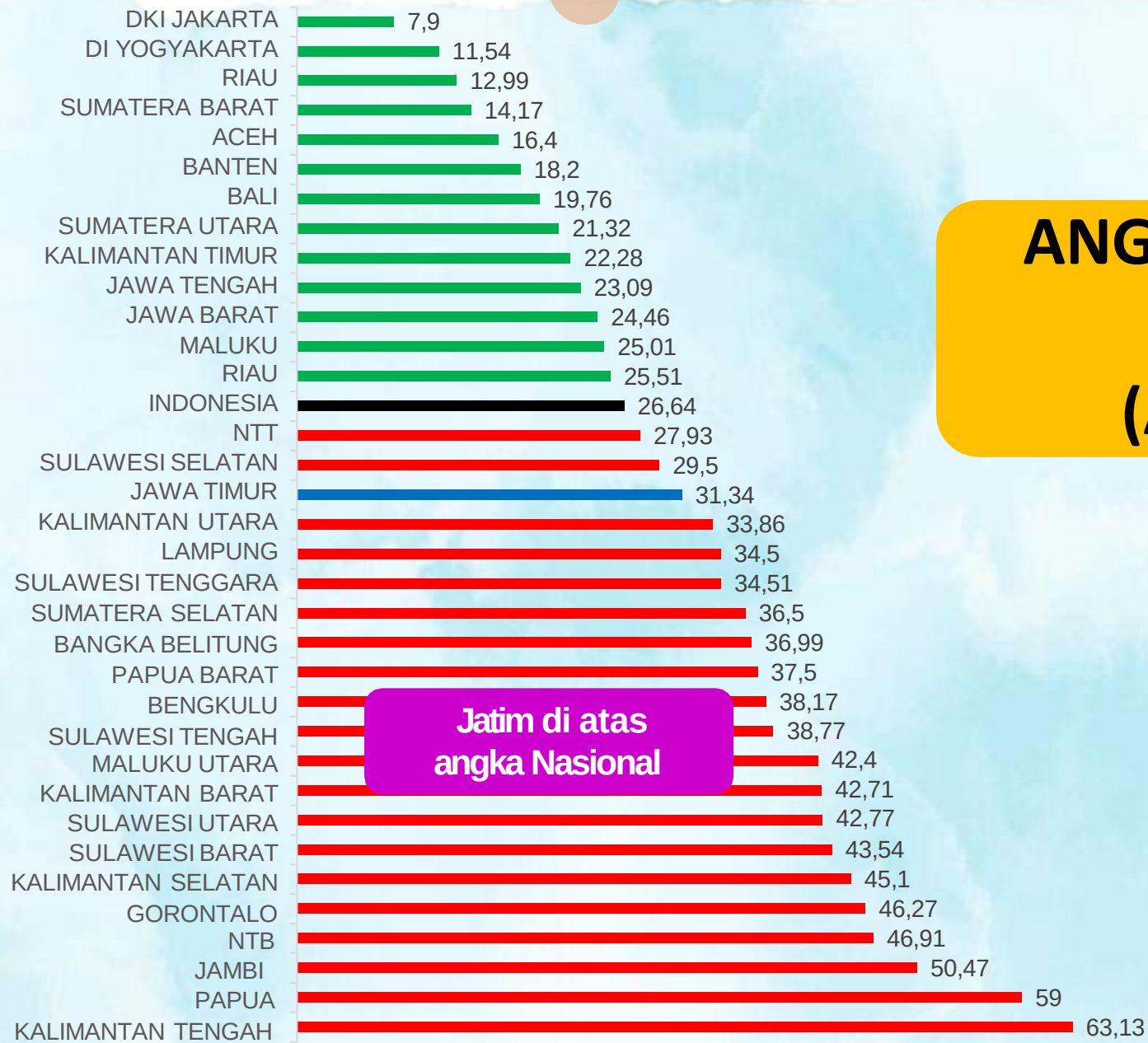
189 ANGKA **KEMATIAN IBU** DALAM
SETIAP **100.000 KELAHIRAN HIDUP**
(Kemenkes LF SP2020, 2022)

Angka Kematian Ibu Melahirkan (per 100.000 Kelahiran Hidup)

Tahun 2020



(Sumber: Kemenkes LF SP2020, 2022)



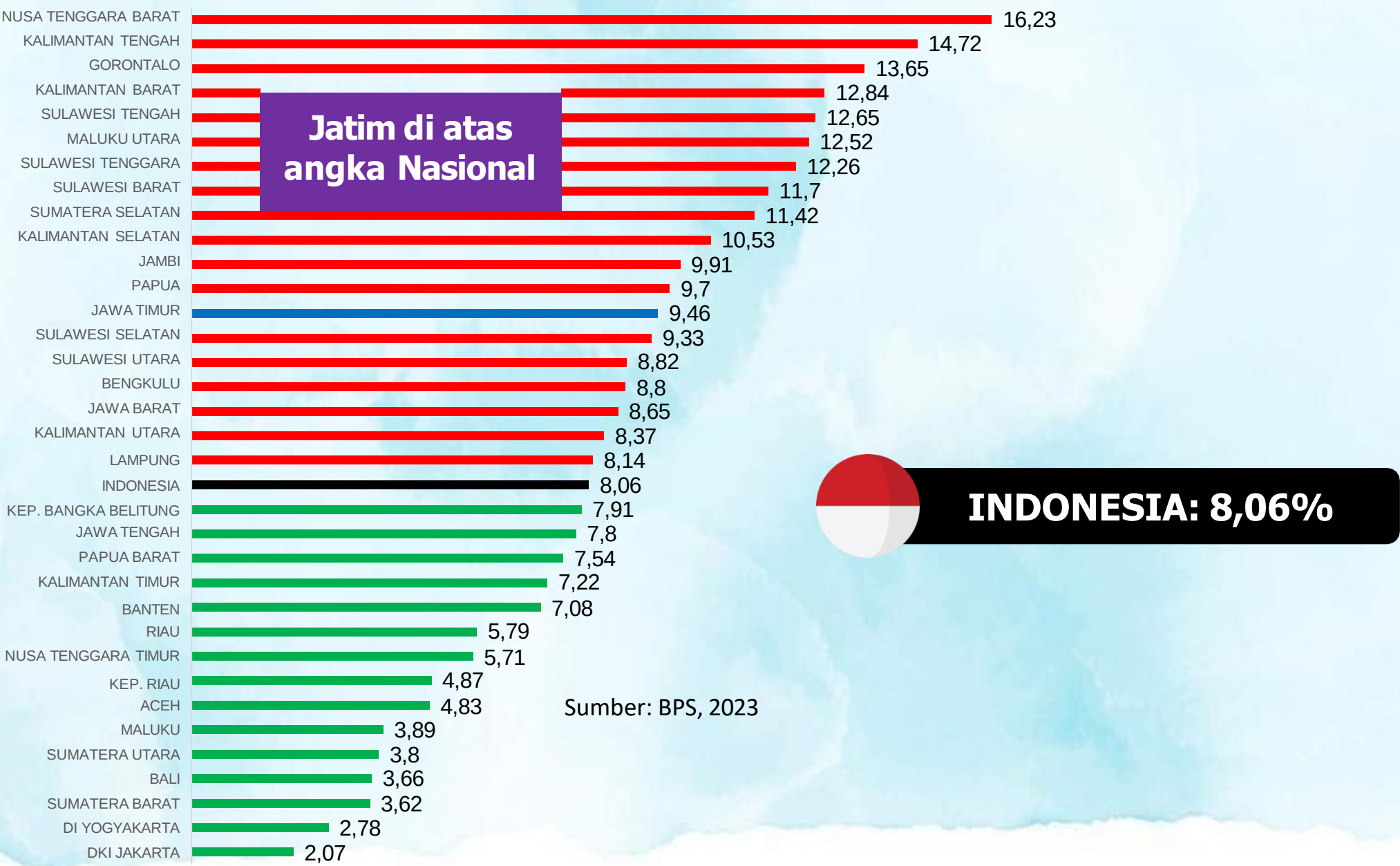
ANGKA KELAHIRAN REMAJA (ASFR 15-19)

Jatim di atas
angka Nasional

Sumber: Kemenkes SP2020, 2022

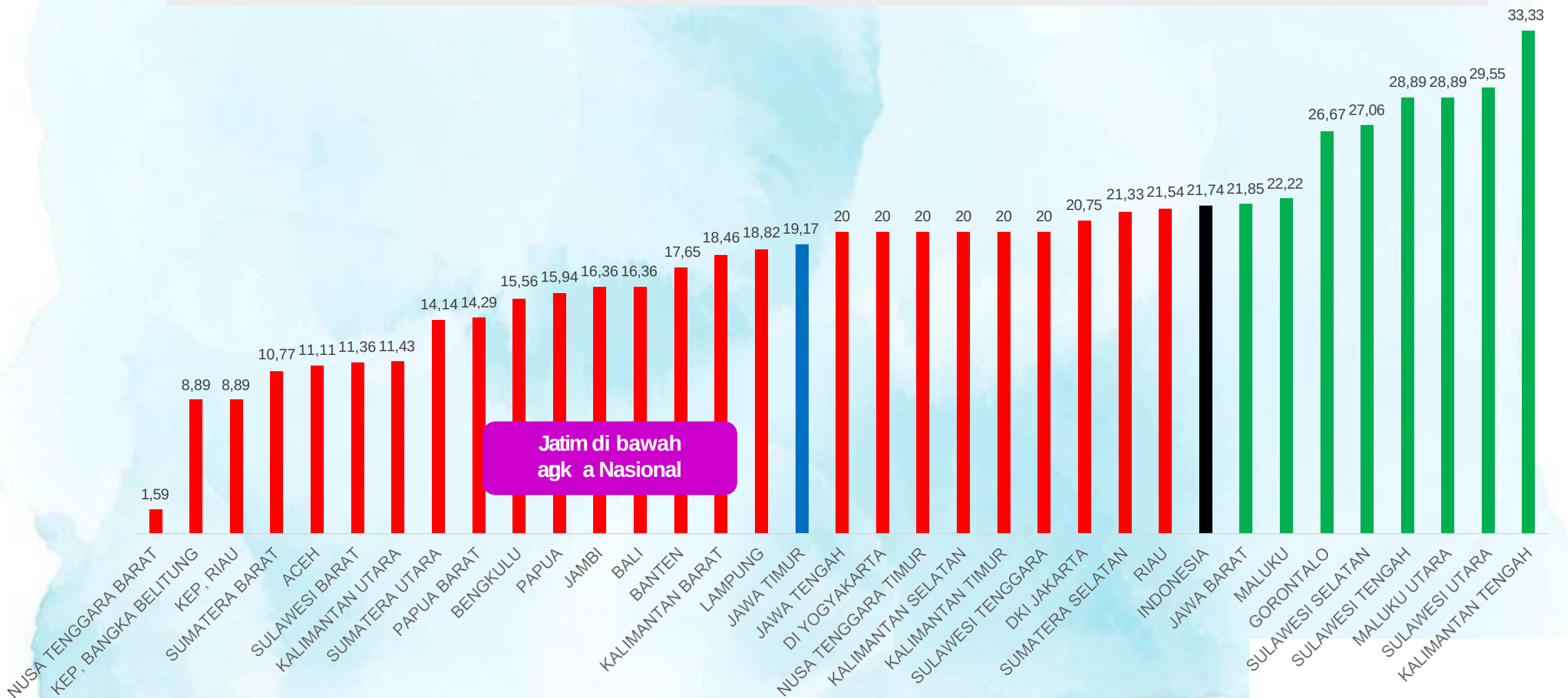


Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Sebelum Umur 18 Tahun, Menurut Provinsi, Tahun 2022





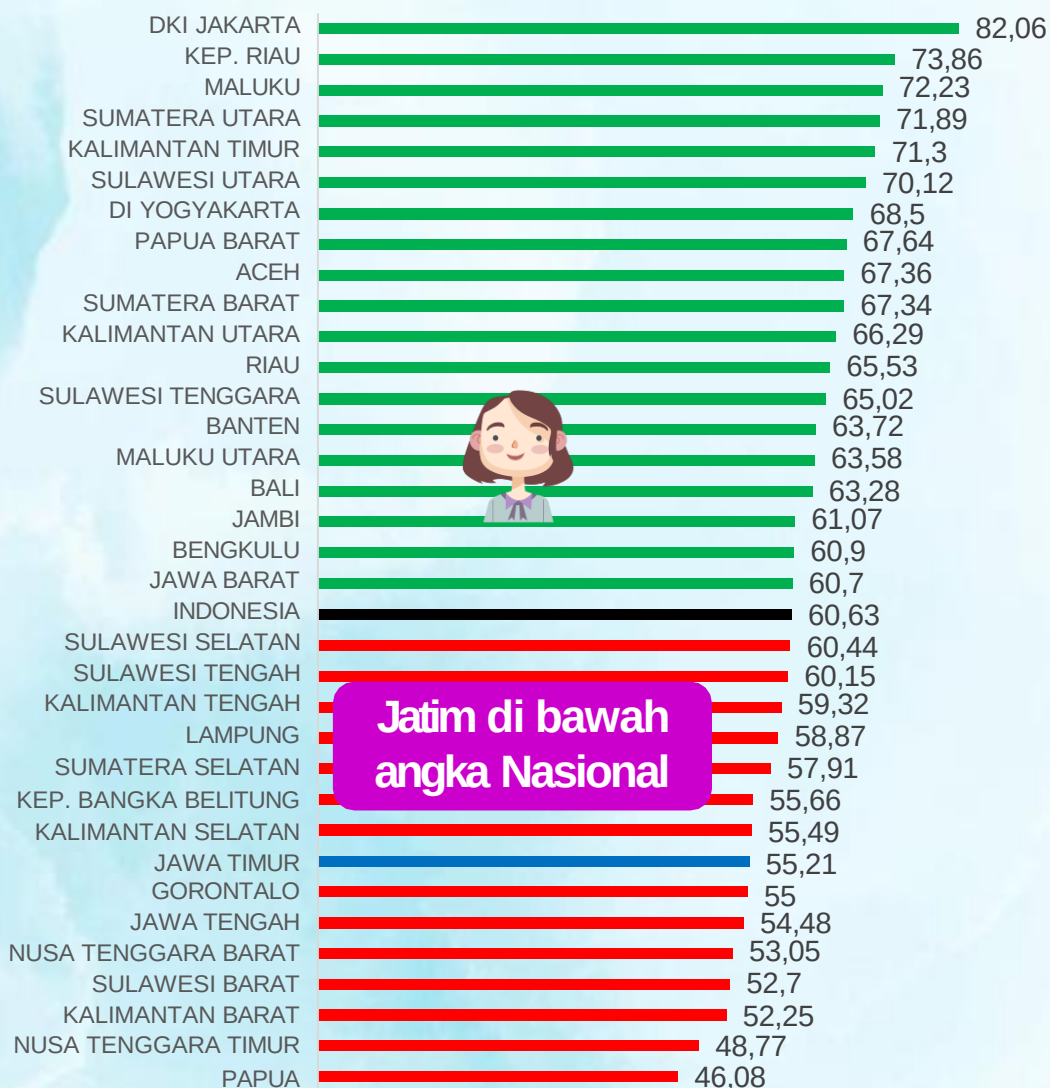
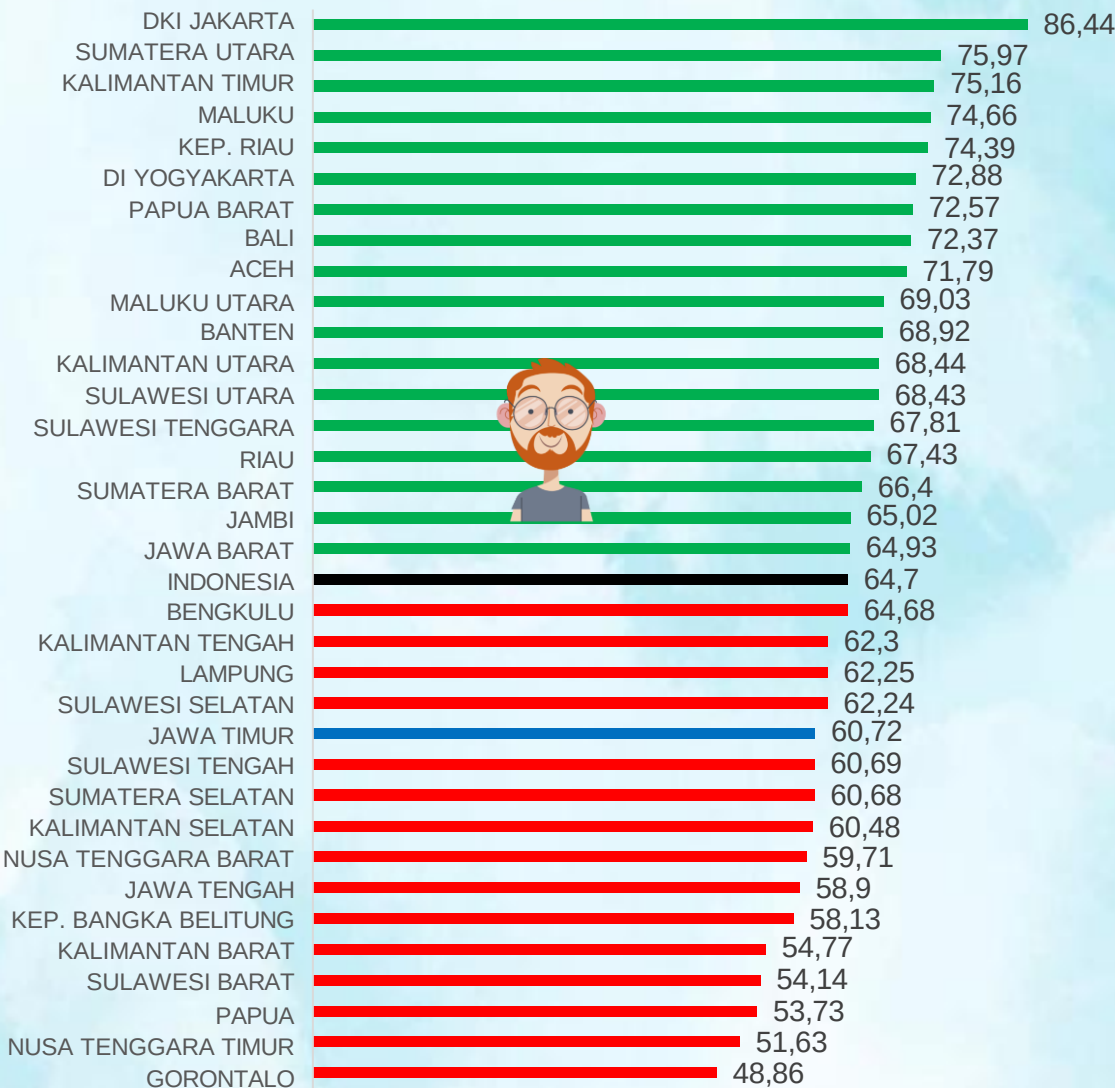
Angka Partisipasi Perempuan di Parlemen Tahun 2022



Sumber: BPS, 2022



Persentase Penduduk Umur >15 Tahun dengan Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan (SMP sampai dengan Perguruan Tinggi), 2022

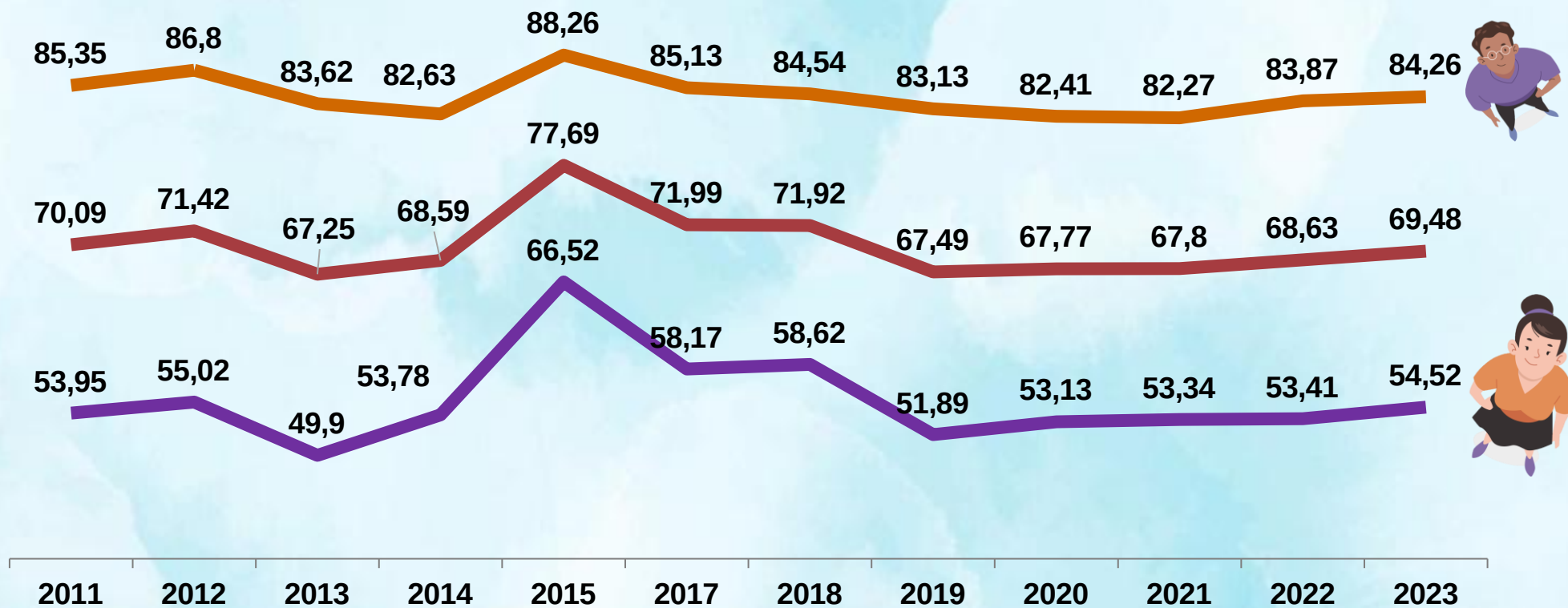


Jatim di bawah angka Nasional

Sumber: Profil Perempuan Indonesia KPPPA, 2023



TPAK Indonesia Tahun 2011-2023





Global Gender Gap Index (GGGI) Tahun 2020-2022

Diukur dengan:

1. Economic Participation and Opportunity
 - a) %TPAK
 - b) Kesetaraan Upah untuk Pekerjaan Sejenis
 - c) Pendapatan per Kapita
 - d) %Legislator, Pejabat Tinggi Negara, dan Manajer Perempuan
 - e) Pekerja Profesional dan Teknikal
1. Educational Attainment
 - a) %Tingkat Literasi
 - b) %Pendaftaran di Sekolah Dasar
 - c) %Pendaftaran di Sekolah Menengah
 - d) %Pendaftaran di Perguruan Tinggi
2. Health and Survival
 - a) %Rasio kelahiran berdasarkan jenis kelamin
 - b) Harapan Hidup Sehat
3. Political Empowerment
 - a) %Perempuan di Parlemen
 - b) %Perempuan sebagai Menteri
 - c) Jumlah tahun kepemimpinan Kepala Negara Perempuan



GGGI Indonesia 2022:

- Ranking 92 dari 146 Negara
- Ranking 6 dari 10 Negara ASEAN
- Ranking 12 dari 18 Negara G20
- Ranking 3 dari 5 Negara MIKTA



INDEKS KUALITAS KELUARGA (IKK) TAHUN 2021-2022

2021

2022

Tertinggi

Tertinggi

Bali
KALIMANTAN TIMUR
Kalimantan Timur

Bali
DI Yogyakarta
KALIMANTAN TIMUR

Terendah

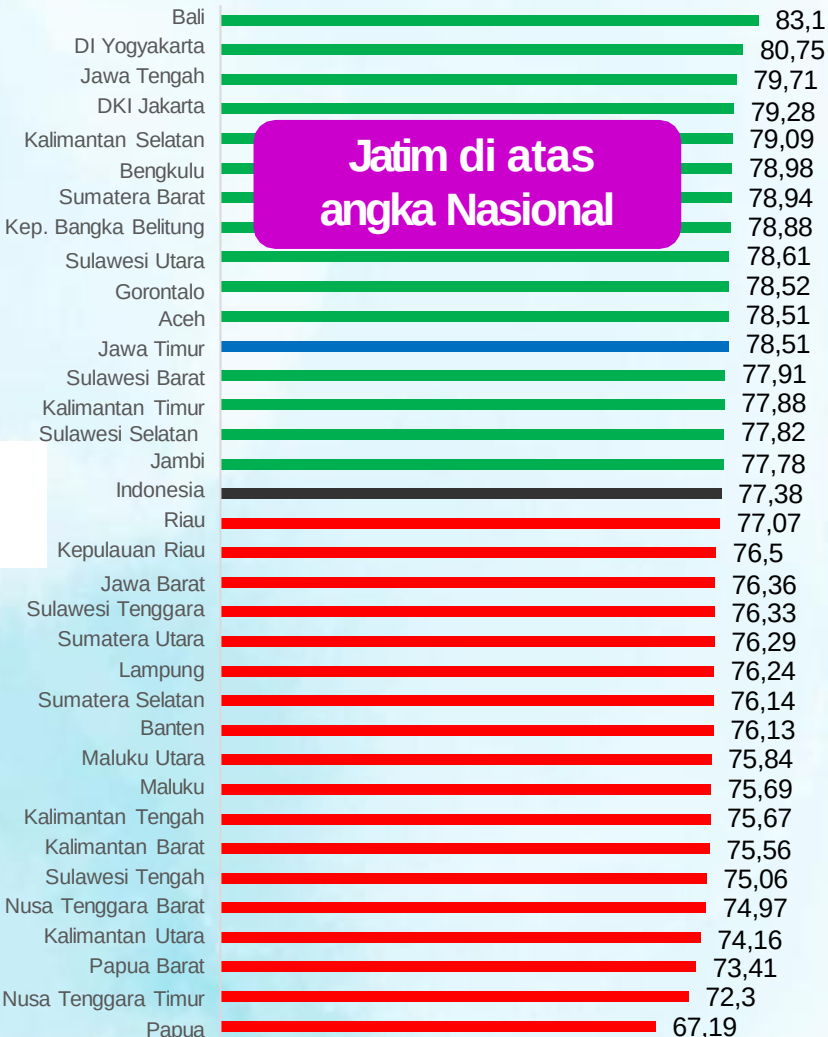
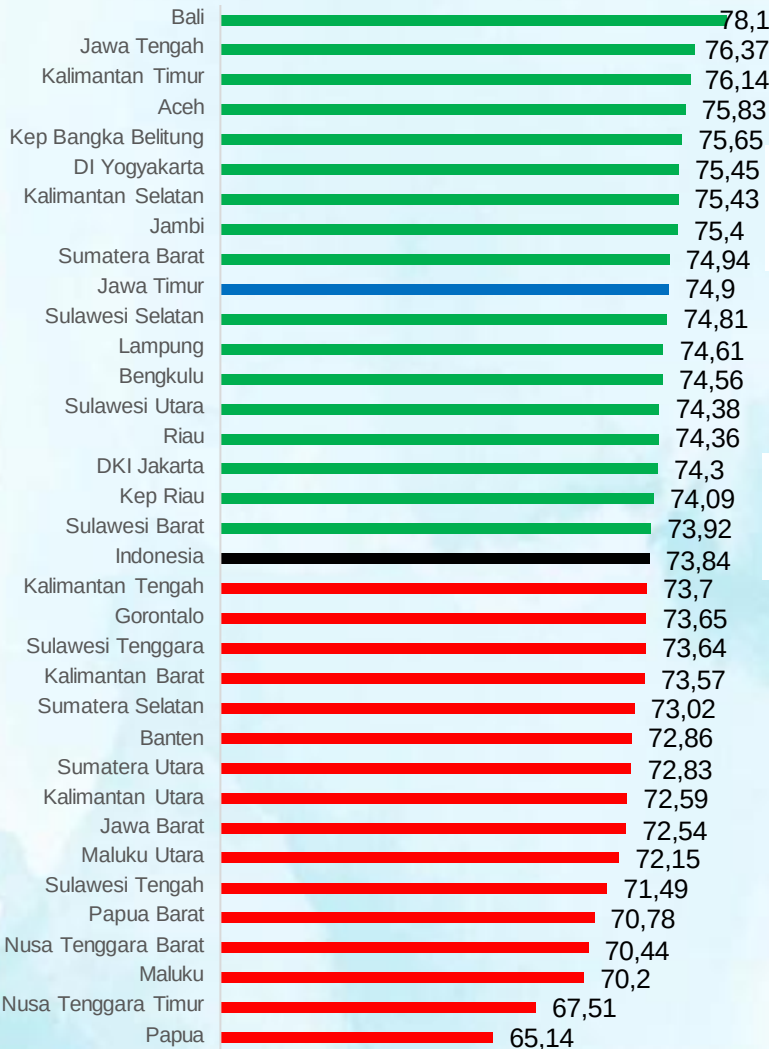
Terendah

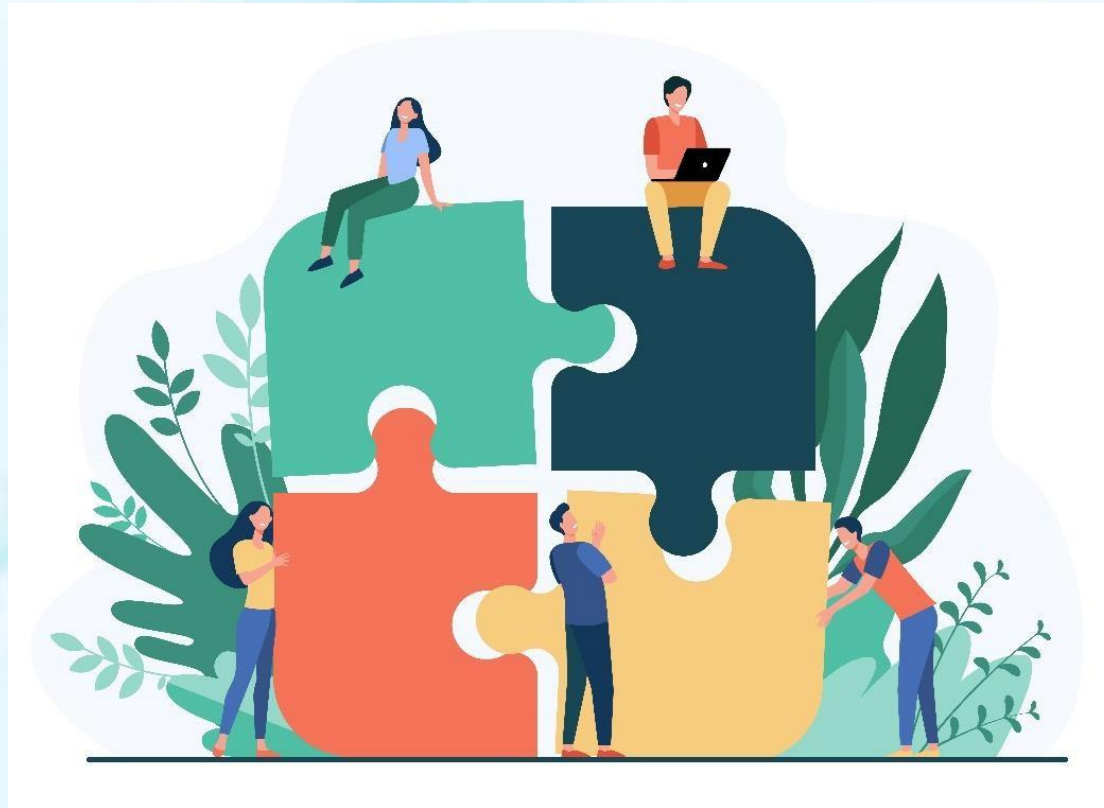
Maluku
Nusa Tenggara Timur
Papua

Papua Barat
Nusa Tenggara Timur
Papua

Terjadi peningkatan nilai IKK di hampir semua provinsi, namun untuk provinsi dengan nilai IKK di bawah nasional mengalami kenaikan dari **16 provinsi di tahun 2021** menjadi **18 provinsi di tahun 2022**

Jatim di atas angka Nasional





3. REVITALISASI “PUG”



REVITALISASI “PUG”

2021-2022 REVITALISASI “PUG” fokus pada:

1. Alat Analisis:

- Perencanaan
- Penganggaran
- Pemantauan
 - Evaluasi
- Pengawasan

2022-2023 REVITALISASI “PUG” fokus pada:

2. Kebijakan Teknis:

- Perencanaan (+ BAPPENAS)
- Penganggaran (+ KEMENKEU)
 - Pemantauan (KPPPA)
 - Evaluasi (KPPPA)
- Pengawasan (+ BPKP)

3. Peningkatan Kapasitas

- Tim Perencana Program dan Penyusun Anggaran
 - Tim Evaluasi K/L dan Daerah
 - Tim Pengawas: APIP



REVITALISASI “PUG”

REVITALISASI	< 2021	2022 dst	
PELEMBAGAAN PUG	7 Prasyarat	3 Prasyarat	1. Kebijakan K/L/D di 7 Proses 2. SDM dan Internalisasi K/L/D di 7 Proses 3. DataTerpilah K/L/D (data sektor, non BPS)
PENYELENGGARAAN PUG	2 Proses	7 Proses	1. PUG dalam Perencanaan 2. PUG dalam Penganggaran 3. PUG dalam Pelaksanaan 4. PUG dalam Pemantauan 5. PUG dalam Evaluasi 6. PUG dalam Pengawasan 7. PUG dalam Pelaporan



3 PRASYARAT “PELEMBAGAAN PUG”

SEMULA

1

Komitmen

2

Kebijakan

3

Kelembagaan

4

Sumber Daya dan Anggaran

5

Data dan Sistem Informasi

6

Alat/*Tools*

7

Partisipasi Masyarakat

REVISI

1. Kebijakan
2. SDM dan Internalisasi
3. Data Terpilah

7 → 3

Prasyarat PUG



2000-2021 (PUG)

- 
1. Perencanaan
 2. Penganggaran
 3. Pelaksanaan
 4. Evaluasi
(kelembagaan)

2022-dst (PUG)

- 
1. Perencanaan (revisi)
 2. Penganggaran (revisi)
 3. Pelaksanaan (seluruh)
 - Pusat
 - Provinsi
 - Kab/Kota
 4. Pemantauan
 5. Evaluasi (seluruh)
 6. Pengawasan (seluruh)
 7. Pelaporan

7 PROSES “PENYELENGGARAAN PUG”



KONTROL atas
Sumber Daya dan
Pengambilan
Keputusan

AKSES

PERENCANAAN

Kebijakan

SDM dan
Internalisasi

Data Terpilah

PEMANTAUAN

PENGANGGARAN

**Alat Analisis
Gender**

Memperoleh
MANFAAT atas
Kebijakan,
Program dan
Kegiatan

PARTISIPASI

PELAKSANAAN

EVALUASI

PENGAWASAN

PELAPORAN



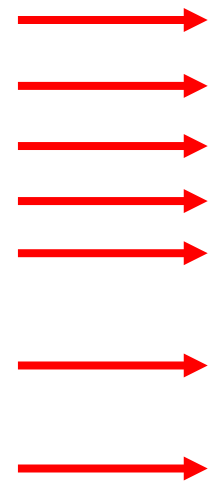
REVITALISASI “PUG”

KEBIJAKAN TEKNIS	K/L	PROVINSI	KAB/KOTA
1. PUG dalam Perencanaan	BAPPENAS	- KEMENDAGRI (BANGDA) - BAPPEDA PROV	- KEMENDAGRI (BANGDA) - BAPPEDA KAB/KOTA
2. PUG dalam Penganggaran	KEMENKEU (DJA)	- KEMENKEU (PKD) - KEMENDAGRI (KEUDA) - TAPD/BKD PROV	- KEMENKEU (PKD) - KEMENDAGRI (KEUDA) - TAPD/BKD KAB/KOTA
3. PUG dalam Pelaksanaan	SELURUH K/L	SELURUH SKPD PROV	SELURUH SKPD KAB/KOTA
4. PUG dalam Pemantauan	SELURUH K/L	SELURUH SKPD PROV	SELURUH SKPD KAB/KOTA
5. PUG dalam Evaluasi	KPPPA	KPPPA	KPPPA
6. PUG dalam Pengawasan	BPKP	INSPEKTUR PROV	INSPEKTUR KAB/KOTA
7. PUG dalam Pelaporan	KEMENPAN-RB	PJ. LAKIP PROV	PJ. LAKIP KAB/KOTA



IMPLEMENTASI PUG

1. Perencanaan
2. Penganggaran
3. Pelaksanaan
4. Pemantauan
5. Evaluasi
1. Pengawasan
(**internal**)
2. Pelaporan



PUSAT

1. Bappenas
2. Kemenkeu
3. K/L
4. K/L
5. KemenPPPA/
Independent
6. BPKP
1. Kemen PANRB

DAERAH

1. Bappeda
2. TAPD
3. OPD
4. OPD
5. KemenPPPA/
Independent
6. APIP
1. Tim LAKIP Daerah

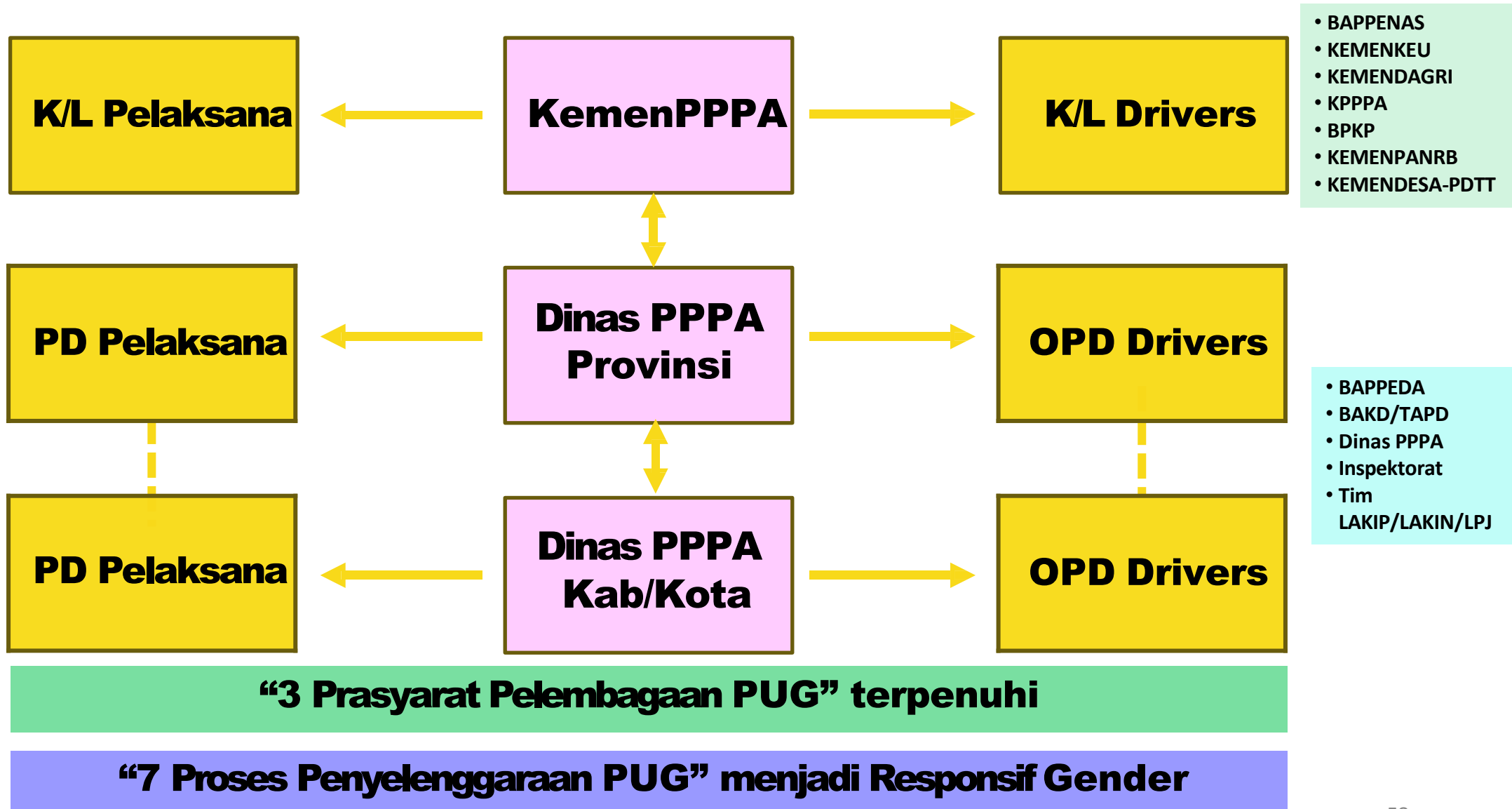


8. Pemeriksaan
(**Eksternal**)

BPK



MEKANISME KOORDINASI





REVITALISASI “PUG”

ALAT ANALISIS	< 2021	2022 dst
1. PUG dalam Perencanaan	- GAP 9 langkah - Tiap Tahun	- <i>GAP (Gender Analysis Pathway)</i> 4 langkah - Tiap 5 Tahun, berisi rencana tahunan
2. PUG dalam Penganggaran	GBS + ToR	- <i>GAB (Gender Action Budget)</i> - K/L di RO; Daerah di Sub-Kegiatan
3. PUG dalam Pelaksanaan	-	<i>Next: 1. GR Procurement 2. GR Public Services</i>
4. PUG dalam Pemantauan	-	<i>GMC (Gender Monitoring Checklist)</i>
5. PUG dalam Evaluasi	-	<i>GET (Gender Evaluation Tool)</i>
6. PUG dalam Pengawasan	-	<i>GAT (Gender Audit Tool)</i>
7. PUG dalam Pelaporan	-	<i>GAR (Gender Accountability Report)</i>



REVITALISASI “PUG”

KERANGKA WAKTU	T-1	T	T+1
1. PUG dalam Perencanaan			
2. PUG dalam Penganggaran			
3. PUG dalam Pelaksanaan			
4. PUG dalam Pemantauan			
5. PUG dalam Evaluasi			Desember
6. PUG dalam Pengawasan	Proses	1 + 2 + 3	
7. PUG dalam Pelaporan			Februari

BIDANG STRATEGIS DAN PEMAMPU PEMBANGUNAN KESETARAAN GENDER

**Tercapainya
Kesetaraan Gender**

Intervensi langsung

Politik

Sosial

Ekonomi

Intervensi pemampu

Hukum

Infrastruktur

Lingkungan Hidup

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Sumber: Presentasi Bappenas, 2023



KERANGKA KERJA LOGIS STRATEGI PUG

Impact

- Menaikkan Indeks Pembangunan Gender menjadi 91,39 di tahun 2024
- Menaikkan Indeks Pemberdayaan Gender menjadi 74,18 di tahun 2024

Outcome

- Persentase kenaikan rata-rata lama sekolah siswa (data terpilah)
- Persentase penurunan angka kekerasan terhadap perempuan
- Persentase kenaikan TPAK perempuan
- Persentase kenaikan angka harapan hidup (data terpilah)

Output

- Output Program/Kegiatan/RO di berbagai sektor

Aktivitas

- Program/kegiatan/KRO/RO Responsif Gender di berbagai sektor disusun, dianggarkan, dilaksanakan, dipantau, dievaluasi dan diawasi

Input

- Sumber Daya Manusia (SDM)
- Anggaran
- Sarana Prasarana

KESETARAAN GENDER

STRATEGI PUG

RPJMN/D

RKP/RKPD

Kontribusi
Sub-Kegiatan
di berbagai PD

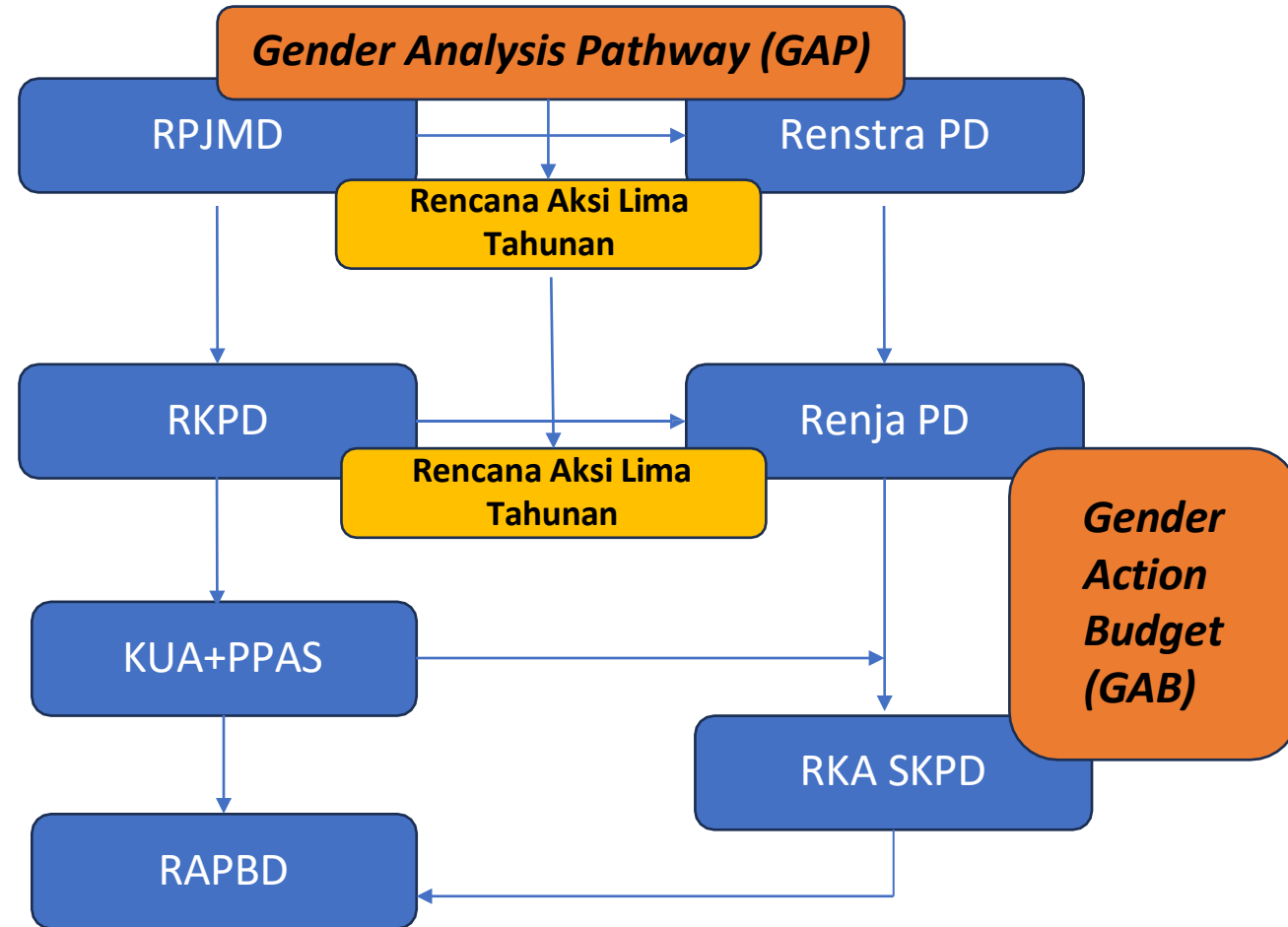
Kontribusi
RO
berbagai
K/L

Kontribusi
RO
berbagai
K/L

Kontribusi
Sub-Kegiatan
di berbagai PD



Revisi Instrumen PUG Daerah



Bagaimana mengidentifikasi isu gender dalam Pembangunan

Tahapan mengidentifikasi isu Gender /GEDSI

- Paham ttg ketidakadilan & menyadari pentingnya kesetaraan dan keadilan gender /GEDSI dalam Pembangunan
- Memahami kebijakan/regulasi terkait isu gender (Konvensi CEDAW, BPFA, UUPPA, UUPKDRT, UUPTPPO, UUTPKS, UU Ketenagakerjaan,SDGs, Inpres PUG, Perda PUG dll)
- Membaca data & informasi ukuran atas keberhasilan Pembangunan : IPM, IPG, IDG, IKG, IPA, dan indicator lainnya (IKU-IKD), data Kekerasan, perkawinan anak
- Melakukan analisis pada data, informasi dan situasi untuk menemukan kesenjangan gender/GEDSI dalam Pembangunan dengan menggunakan analisis APKM.
- Melakukan Pengarusutamaan Gender/GEDSI dalam 7 proses Pembangunan (Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, penilaian, pelaporan dan pengawasan).

Bentuk Ketidakadilan Gender/GEDSI



SUBORDINASI



BEBAN GANDA



MARGINALIASI



PELABELAN

INTERSEKSIONALITAS GENDER:

- Irisan isu gender dengan status sosial (umur, disabilitas, status perkawinan, dll)
- Perempuan dan anak tidaklah homogen



KEKERASAN

ISU KETIDAKADILAN & KETIDAKSETARAAN GEDSI

1. PENDIDIKAN

- Tidak sekolah atau putus sekolah lebih banyak pada anak Perempuan, disabilitas dan keluarga miskin yang biasanya di wilayah pedesaan atau kepulauan
- Pendidikan formal, pengetahuan dan ketrampilan terbatas, sehingga tidak bisa bersaing dalam dunia kerja
- Tidak sekolah karena menikah muda dan kemudian menjadi pekerja anak
- Angka putus sekolah setingkat SMP dan SMA lebih banyak anak laki-laki

2. KESEHATAN

- Masih adanya angka kematian ibu dan bayi
- Usia harapan hidup laki-laki yang lebih rendah daripada Perempuan
- Tingginya angka BGM dan Stunting serta obesitas
- Remaja putri banyak mengalami anemia
- Meningkatnya angka kehamilan yang tidak diinginkan

3. EKONOMI

- Kemiskinan pada Perempuan
- Perlindungan pada pekerja Perempuan di sektor informal masih terbatas
- Adanya perbedaan upah pada pekerja di sektor informal
- Tingginya pekerja migran yang bermasalah terutama Perempuan dan kemudian menjadi korban TPPO
- Akses pekerjaan terutama di sektor formal bagi Perempuan dan kelompok disabilitas yang masih terbatas.

4. KEKERASAN

- Meningkatnya kasus kekerasan berbasis gender dalam berbagai bentuk fisik, psikis, seksual,

IPM

IPG

IDG/
IKG

KASUS
KEKERASAN

Indeks Pembangunan Kota Malang Tahun 2022

No	Indikator Pembangunan	Jatim	Kota Malang	Keterangan
1.	IPM	L : 76,81 P : 70,73	L : 85,89 P : 82,06	UHH Laki-laki : 71,72 UHH Perempuan : 75,61 HLS Laki-laki : 15.94 HLS Perempuan : 15.75 RLS Laki-laki : 11,29 RLS Perempuan : 10.56 Pendapatan Laki-laki : 20,943 Pendapatan Perempuan : 16.612
2.	IPG	92.08	95,54	Komponen penyumbanganya sama dengan IPM
3.	IDG	74.42	78.77	Keterwakilan Prmpuan : 26,67 Perempuan Profesional : 53,58 Pendapatan Perempuan : 34,81
4.	IKG	0,44	0,35	

Berdasarkan Capaian IPM-IPG, IDG isu gender sbb

- Usia harapan hidup laki-laki lebih rendah daripada Perempuan
- Masih rendahnya keterwakilan perempuan dibandingkan laki-laki dilembaga legislative
- **Masih rendahnya tingkat pendapatan perempuan (IPM & IDG)**

I

Analisis Isu gender makro

Pendapatan Perempuan lebih rendah daripada laki-laki *disebabkan :*

1. **Tingkat pendidikan Perempuan lebih rendah**
2. Lapangan kerja untuk perempuan terbatas
3. Perempuan berpendidikan memutuskan tidak bekerja
4. Upah pekerja Perempuan lebih rendah, terutama di sektor informal
5. Perempuan tidak terlalu suka memperkerjakan Perempuan
6. Perempuan berpikir bahwa mencari nafkah tanggungjawab laki-laki
7. Perempuan dengan disabilitas sangat terbatas akses ke dunia kerja dengan berbagai penyebab.

Analisis isu gender : Tingkat pendidikan Perempuan lebih rendah

- *Perkawinan anak- pernikahan lebih awal*, karena kehamilan yang tidak diinginkan → pergaulan yang tidak terkendali, ketidaktahuan ttg Kesehatan reproduksi, dipaksa menikah oleh orang tua → takut dengan stigma perawan tua, kuatir terjadi perzinaan, sudah tidak sekolah, sudah bekerja/pekerja anak → *(DP3A, Dinkes, Diknas, Dinas KB, Disnaker, Dinsos, Kemenag)*
- *Jarak sekolah yang terlalu jauh*, karena tidak ada sarana transportasi-angkutan umum, lokasi desa belum terhubung dengan desa yang ada sekolahan → *Dinas PU Bina Marga, Dishub,*
- *Kondisi ekonomi orang tua yang kurang* , karena tidak bekerja, modal terbatas, tidak ada ketrampilan kerja → *Diskop, Dinsos, DPMD, Distan, Disnak, Disnaker, dll*

Analisis isu gender (GAP 4 Langkah)

Isu kesenjangan (1)	Faktor Penyebab (2)	Susun Aksi (3) & Pembagian peran	
Rendahnya keterwakilan Perempuan dibandingkan laki-laki di parlemen (16,00 %-IDG 2022-BPS)	• Perempuan potensial enggan & merasa kurang mampu jadi caleg • Kebijakan afirmasi untuk kuota bagi Perempuan di parlemen belum sepenuhnya dijalankan • Perempuan belum menggunakan suaranya utk memenangkan caleg Perempuan • Partai politik tidak serius dalam menjadikan caleg Perempuan jadi aleg • Perempuan tidak punya modal cukup untuk menjadi caleg	Impact : meningkatnya IDG Kab Sidoarjo Outcome : 1. Meningkatnya kuantitas & Kualitas keterwakilan Perempuan di parlemen 2. Isu gender mendapatkan prioritas penanganan Output : 1. jumlah caleg Perempuan meningkat 2. Partisipasi pemilih Perempuan , disabilitas meningkat 3. Kapasitas aleg Perempuan meningkat Kegiatan : 1. Kajian terkait keterwakilan Perempuan → Brista 2. Pendidikan politik bagi Perempuan → Dinas P3A , KesbangPol 3. Koordinasi dan advokasi ke partai politik → kesbangpol 4. Pelatihan untuk Aleg Perempuan → Sekwan 5. Pelatihan untuk Perempuan potensial caleg → DP3A, Diknas, atau PD lain terkait	

- Dari hasil analisis isu Gender/GEDSI menjadi dasar dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan (strategis maupun yang tahunan)→ RPJPD, RPJMD, RENJA
- Isu gender dalam Pembangunan akan menjadi dasar dalam pertimbangan penetapan alokasi anggaran. Anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan yang menyelesaikan langsung & tidak langsung isu gender disebut Anggaran Responsif Gender (ARG)
- Sebagai bukti pelaksanaan PUG ditingkat pemerintah daerah adalah dokumen Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender.
- Format untuk penyusunan dokumen ARG sudah ada dalam panduan penyusunan PPRG.



#bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

OPTIMIS
JATIM BANGKIT

CETAR!

DP3AK
#tangkas-tuntas

PENGARUSUTAMAAN GENDER

Langkah-Langkah Percepatan



@dp3akjatim.official



<https://dp3ak.jatimprov.go.id>



DP3AK JATIM

PELEMBAGAAN PUG

1. REGULASI → PERDA

Materi PERDA sudah mengintegrasikan 7 (tujuh) proses penyelenggaraan PUG, yaitu: Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan, dan Pelaporan.

PELEMBAGAAN PUG

2. SDM terlatih PUG

Semua SDM yang menangani PUG dalam 7 (tujuh) proses pembangunan harus terlatih PUG, yaitu:

- ✓ **Perencana: Bappeda**
- ✓ **Penyusun Anggaran: TAPD**
- ✓ **Pelaksana: seluruh SKPD**
- ✓ **Pemantauan: seluruh SKPD**
- ✓ **Evaluator: Dinas PPPA (koord)**
- ✓ **Pengawas: Inspektur/APIP**
- ✓ **Penyusun Laporan: Tim LAKIP/LAKIN/LPJ**

Siapa yg melatih SDM tsb? Pusklat atau masing2 SKPD?

PELEMBAGAAN PUG

2. Internalisasi PUG

PUG dalam 7 (tujuh) proses pembangunan harus terinternalisasi secara komprehensif.

Peran Provinsi membina Kab/Kota.

Peran Kab/Kota membina Desa/Kelurahan.

Internalisasi bisa dilakukan melalui:

- ✓ **Advokasi dan Sosialisasi**
- ✓ **Bimtek**
- ✓ **ToT dan Pelatihan**
- ✓ **Pendampingan**
- ✓ **Fasilitasi**
- ✓ **dll**

PELEMBAGAAN PUG

3. DATA TERPILAH

Untuk mengetahui ada/tidaknya isu gender, maka harus tersedia “Data Terpilah” menurut jenis kelamin dari berbagai bidang pembangunan.

“Data terpilah” sangat dibutuhkan dalam Penyelenggaraan PUG di 7 (tujuh) proses pembangunan.

“Data Terpilah” terdiri dari data-data yang dihasilkan oleh BPS (statistik dasar), dan juga STATISTIK/DATA SEKTOR yang dihasilkan dari Dinas2.

Data Sektor seringkali belum/tidak tersedia, karena dari sejak awal tahap perencanaan kegiatan/sub-kegiatan yang dilakukan Dinas2: data tsb belum/tidak dilakukan pemilahan menurut jenis kelamin. Jika data tidak terpilah maka akan sulit untuk mengetahui apakah kesenjangan gender sudah mengecil atau hilang.

PENYELENGGARAAN PUG

1. PERENCANAAN

Tahap Perencanaan adalah tahap awal yang terpenting!

Output:

1. Dokumen Perencanaan 5 Tahun (RPJMD dan Renstra SKPD) yg responsif gender
2. Dokumen Perencanaan Tahunan (RKPD) yg responsif gender

Mulailah dari bidang-bidang yang memberikan dampak tinggi untuk memperkecil/menghilangkan kesenjangan gender → tersebar di banyak SKPD.

Mulailah dari bidang-bidang yang memberikan dampak tinggi untuk meningkatkan nilai-nilai berbagai indeks/indikator (positif), seperti: IPM, IPG, IDG, TPAK, dll; serta menurunkan nilai-nilai indeks/indikator (negatif), seperti: IKG, GGGI, AKI, dll.

- ✓ Bappeda agar mengeluarkan “**kebijakan**” untuk mengatur PUG dalam Perencanaan.
- ✓ Alat Analisis: **Gender Analysis Pathway (GAP)** → telah disederhanakan menjadi “**GAP 4 langkah**”. GAP digunakan untuk menyusun dokumen perencanaan 5 tahun (berisi rencana tahunan).

PENYELENGGARAAN PUG

1. PERENCANAAN

Pokja PUG dalam Perencanaan:

Koordinator: Bappeda

Anggota: Para Perencana dari semua SKPD terkait

PD terkait:

- **IPM dan IPG: Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi**
- **IDG: Politik dan Kepemimpinan (Kesbangpol? Pusdiklat?), Ketenagakerjaan, Ekonomi**
- **TPAK: Ketenagakerjaan, semua SKPD yang menciptakan lapangan kerja**
- **IKG: Kesehatan, KB, Perkawinan Anak, Pendidikan, Politik dan Kepemimpinan, Ketenagakerjaan**
- **GGGI: Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, Politik dan Kepemimpinan**
- **AKI: Kesehatan, KB**
- **dll**

PENYELENGGARAAN PUG

2. PENGANGGARAN

Tahap Penganggaran digabungkan dengan tahap Perencanaan Tahunan → adalah tahap terpenting!

Output:

1. Dokumen Penganggaran Tahunan: (KUA/PPAS) yg responsif gender
 - Jumlah Sub Kegiatan yang di-tagging sebagai Anggaran Responsif Gender (ARG);
 - Jumlah Rp dari seluruh Sub-Kegiatan yang di-tagging
 - Jumlah SKPD yang melakukan tagging
2. Penyusunan ARG diakomodasi dalam penyusunan RKA SKPD

Mulailah dari SKPD-SKPD yang mendukung secara significant untuk memperkecil/menghilangkan kesenjangan gender.

Mulailah dari bidang-bidang yang memberikan dampak tinggi untuk meningkatkan nilai-nilai berbagai indeks/indikator (positif), seperti: IPM, IPG, IDG, IKK, TPAK, dll; serta menurunkan nilai-nilai indeks/indikator (negatif), seperti: IKG, GGGI, AKI, dll.

- ✓ TAPD/BAKD agar mengeluarkan “**kebijakan**” untuk mengatur PUG dalam Penganggaran.
- ✓ Alat Analisis: **Gender Action Budget (GAB)** → disederhanakan yg semula GBS dan ToR/KAK
- ✓ Pokja PUG dalam Penganggaran:
 - Koordinator: Ketua BAKD
 - Anggota: Para Perencana dan Penyusun Anggaran dari semua SKPD terkait (1. PERENCANAAN)

PENYELENGGARAAN PUG

3. PELAKSANAAN

PD terkait:

- **IPM dan IPG: Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi**
- **IDG: Politik dan Kepemimpinan (Kesbangpol? Pusklat?), Ketenagakerjaan, Ekonomi**
- **TPAK: Ketenagakerjaan, semua SKPD yang menciptakan lapangan kerja**
- **IKG: Kesehatan, KB, Perkawinan Anak, Pendidikan, Politik dan Kepemimpinan, Ketenagakerjaan**
- **GGGI: Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, Politik dan Kepemimpinan**
- **AKI: Kesehatan, KB**
- **dll**

PENYELENGGARAAN PUG

4. PEMANTAUAN

Masing2 SKPD memantau kinerja dari kebijakan/program/kegiatan yang terkait dengan:

- **IPM dan IPG: Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi**
- **IDG: Politik dan Kepemimpinan (Kesbangpol? Pusdiklat?), Ketenagakerjaan, Ekonomi**
- **TPAK: Ketenagakerjaan, semua SKPD yang menciptakan lapangan kerja**
- **IKG: Kesehatan, KB, Perkawinan Anak, Pendidikan, Politik dan Kepemimpinan, Ketenagakerjaan**
- **GGGI: Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, Politik dan Kepemimpinan**
- **AKI: Kesehatan, KB**
- **dll**

Alat analisis: Gender Monitoring Checklist (GMC).

PENYELENGGARAAN PUG

5. EVALUASI

Dinas PPPA mengoordinasikan proses Evaluasi PUG dari seluruh SKPD terkait:

- IPM dan IPG: Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi
- IDG: Politik dan Kepemimpinan (Kesbangpol? Pusdiklat?), Ketenagakerjaan, Ekonomi
- TPAK: Ketenagakerjaan, semua SKPD yang menciptakan lapangan kerja
- IKG: Kesehatan, KB, Perkawinan Anak, Pendidikan, Politik dan Kepemimpinan, Ketenagakerjaan
- GGGI: Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, Politik dan Kepemimpinan
- AKI: Kesehatan, KB
- dll

- ▶ Alat analisis: **Gender Evaluation Tool (GET)**.
- ▶ Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE) merupakan Evaluasi di tingkat nasional (oleh Kementerian PPPA). Daerah dapat melakukan Evaluasi PUG dengan menggunakan GET.

PENYELENGGARAAN PUG

6. PENGAWASAN

Inspektorat/APIP melakukan pengawasan, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan → peran Inspektorat/APIP sangat penting.

Jika ditemukan belum RG, maka perlu diberikan rekomendasi kepada SKPD terkait.

Alat analisis: Gender Audit Tool (GAT).

PENYELENGGARAAN PUG

7. PELAPORAN

Tim Penyusun LAKIP/LAKIN/LPJ Daerah.

Alat analisis: Gender Accountability Report (GAR).



PUG dalam Perencanaan

- **Jangka Menengah: 5 tahun**

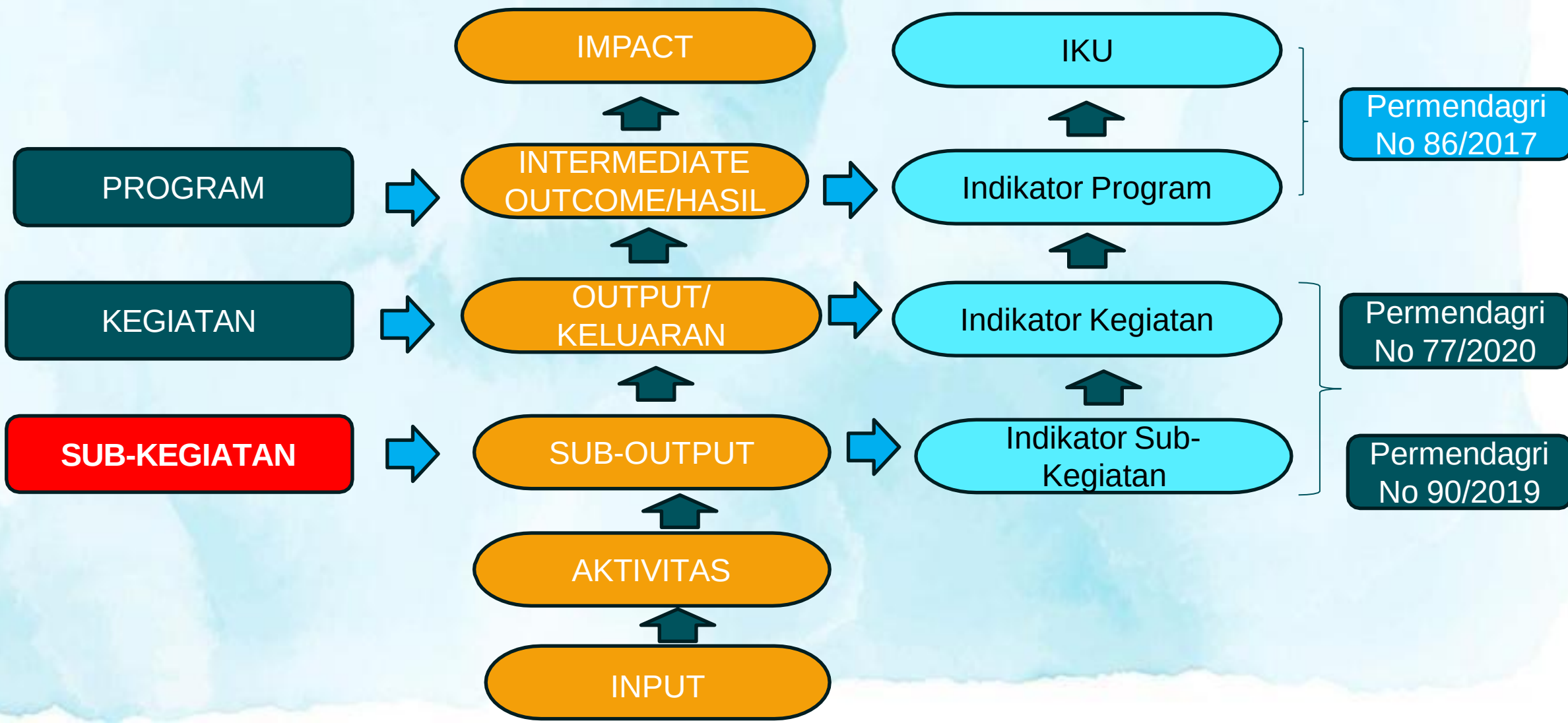
1. KEBIJAKAN:
Bappenas dan Kemendagri

2. ALAT ANALISIS:
***Gender Analysis Pathway (GAP)* - 4 langkah**

3. SDM:
Bappeda + Para Perencana SKPD



Kerangka Kerja Logis untuk RPJMD





Permendagri No. 15/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah

Pasal 4 ayat (1)

Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender yang dituangkan dalam:

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
- Rencana Strategis (Renstra) SKPD
- Rencana Kerja (Renja) SKPD

Pasal 6

(1) Bappeda mengoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra SKPD, dan Rencana Kerja SKPD berperspektif gender.

(2) Rencana Kerja SKPD berperspektif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan **Peraturan Gubernur, Bupati, dan Walikota.**



PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Pasal 33 ayat (3) dan Penjelasannya

Perencanaan Pembangunan Daerah disusun melalui Kerangka Studi dan instrumen analisis yg berupa analisis spesifik, seperti analisis biaya dan manfaat, analisis kemiskinan, dan **analisis gender**.



SISTEMATIKA RPJMD DAN PROSES PUG

Analisis Gender
Daerah



1. **Pendahuluan**
2. **Gambaran Umum Kondisi Daerah**
3. **Gambaran Keuangan Daerah**
4. **Permasalahan dan Isu-isu Strategis Daerah**
5. **Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**
6. **Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah**
7. **Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**
8. **Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**
9. **Penutup**



**RPJMD
RESPONSIF
GENDER**

OUTPUT:
RPJMD Responsif Gender dan Renstra PD Responsif Gender



REVISI INSTRUMEN PERENCANAAN

SEMULA

PERENCANAAN :

- GAP 9 Langkah
- Tahunan
- Pusat: sebagai bahan penyusunan GBS di level RO di Renja K/L dan RKA K/L
- Daerah: sebagai bahan penyusunan GBS di level Sub-Kegiatan di Renja SKPD dan RKA SKPD

REVISI

PERENCANAAN:

- GAP 4 Langkah
- Lima Tahunan (dirinci Tahunan)
- Pusat: sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan lima tahunan (RPJMN dan Renstra K/L) yang responsif gender
- Daerah: sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan lima tahunan (RPJMD dan Renstra SKPD) yang responsif gender



REVISI

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

SEMULA

- Langkah 1:
- Langkah 2:
- Langkah 3:
- Langkah 4:
- Langkah 5:
- Langkah 6:
- Langkah 7:
- Langkah 8:
- Langkah 9:



REVISI

- Langkah 1:
- Langkah 2:
- Langkah 3:
- Langkah 4:



Semula: GAP 9 Langkah

Revisi: GAP 4 Langkah

Tahap I Analisis Kebijakan yang responsif gender					Tahap II Formulasi Kebijakan dan rencana Aksi ke depan		Tahap III Pengukuran hasil	
Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Pilih kebijakan/program/kegiatan yang akan dianalisis	Data pembuka wawasan	Isu Gender			Kebijakan & Rencana ASksi		Pengukuran hasil	
		Faktor kesenjangan gender	Sebab kesenjangan internal	Sebab kesenjangan eksternal	Reformulasi tujuan	Rencana aksi	Data dasar	Indikator kinerja
Identifikasi dan tuliskan tujuan dari kebijakan/program/kegiatan	Sajikan data pembuka wawasan yang terpilah menurut jenis kelamin, kuantitatif dan kualitatif	Temu kenali isu gender di proses perencanaan dengan memperhatikan faktor-faktor kesenjangan: akses, partisipasi, kontrol dan manfaat (Cantumkan hanya faktor kesenjangan yang relevan)	Temu kenali penyebab kesenjangan gender yang berasal dari internal Lembaga dan/atau budaya organisasi	Temu kenali penyebab kesenjangan gender yang datang dari lingkungan eksternal Lembaga pada proses pelaksanaan program/kegiatan	Reformulasikan tujuan kebijakan/program/kegiatan bila tujuan yang ada belum responsif gender/belum efektif untuk menjawab isu gender yang diuraikan di langkah 2, 3, 4 dan 5	Tetapkan rencana aksi/kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang responsif gender/menjawab isu gender di langkah 3, 4 dan 5	Tetapkan data dasar yang diambil dari langkah 2 yang relevan untuk mengukur pencapaian tujuan di langkah 6	Tetapkan indikator kinerja (komponen /rincian output maupun outcome) yang menjadi alat ukur pencapaian tujuan di langkah 6



Langkah 1	Tentukan satu isu gender strategis dari indikator pembangunan kesetaraan gender (misalnya: IPG, IDG, IKG)
Langkah 2	Identifikasi faktor-faktor penyebabnya
Langkah 3	Susun Rencana Aksi (menggunakan Kerangka Kerja Logis) yang terdiri dari 5 elemen, yaitu input, aktivitas, output, outcome, impact
Langkah 4	Identifikasi Kementerian/Lembaga yang relevan



PUG dalam PERENCANAAN

Alat Analisis: *GAP (Gender Analysis Pathway)* versi 4 Langkah





KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

PUG dalam PENGANGGARAN



PUG dalam Penganggaran

- **Setiap Tahun**

1. KEBIJAKAN:
Kemenkeu dan Kemendagri

2. ALAT ANALISIS:
Gender Action Budget (GAB)

3. SDM:
Bappeda, BAKD, TAPD + Para Penyusun Anggaran SKPD



REVISI INSTRUMEN PENGANGGARAN

SEMULA

- *Gender Budget Statement (GBS)* dan ToR
- Tahunan

REVISI

- *Gender Action Budget (GAB)*
- Tahunan



GENDER ACTION BUDGET (GAB)

SEMULA

Dokumen Anggaran Responsif Gender (ARG) mencakup:

1. RKA SKPD
2. *Gender Budget Statement (GBS)*
3. KAK/ToR



REVISI

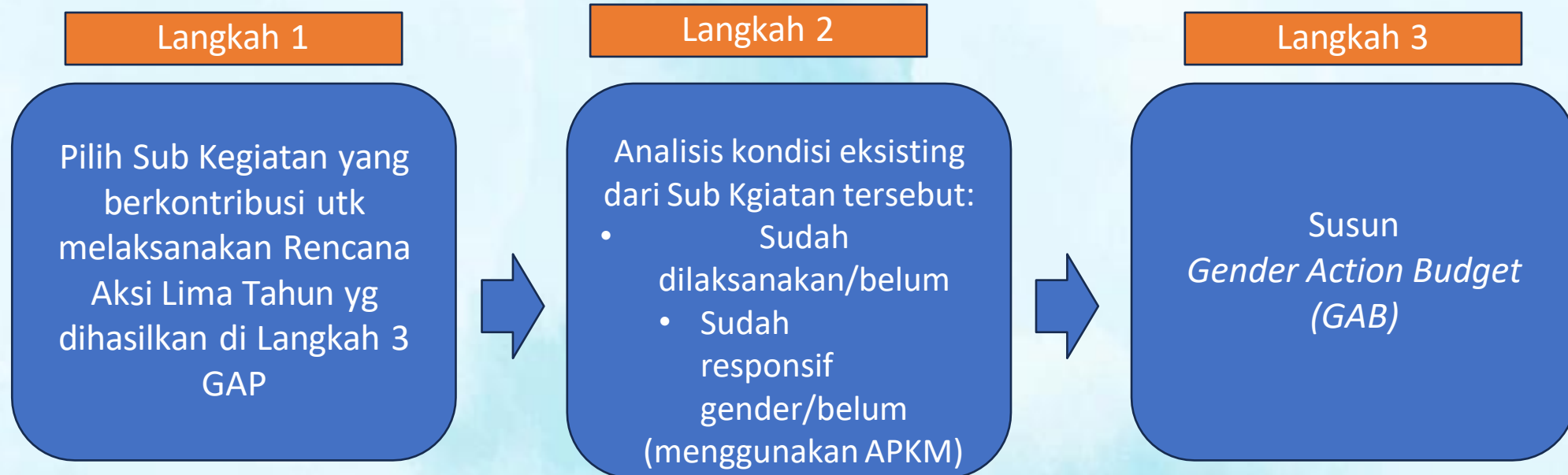
Dokumen Anggaran Responsif Gender (ARG) mencakup:

1. RKA SKPD
2. *Gender Action Budget (GAB)*

[GAB berisi informasi di GBS dan KAK/ ToR: simplifikasi dokumen)



Langkah Penyusunan *Gender Action Budget (GAB)*



- *Gender Action Budget (GAB)* mulai disusun di tahapan penyusunan Renja SKPD.
- Informasi *GAB* dimuat dalam dokumen RKA SKPD; dan *GAB* menjadi dokumen pendukung dari RKA SKPD.
- RKA SKPD yang memuat *GAB* merupakan Anggaran Responsif Gender (ARG).



Permendagri No. 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri No. 15 Tahun 2008

Pasal 5A

- Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dituangkan dalam penyusunan GBS.
- Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar SKPD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA SKPD.

[Catatan: GBS dan KAK/ToR diganti dengan GAB.]



FORMAT GENDER ACTION BUDGET (GAB) UNTUK DAERAH

Gender Action Budget (GAB) = ToR Sub Kegiatan

Responsif Gender

- sebagai dokumen pendukung pada saat penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA Perangkat Daerah
- memastikan APKM (Akses, Partisipasi, Kontrol, Manfaat) yang setara antara laki-laki dan perempuan (d disesuaikan dengan karakteristik Sub Kegiatan)

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE SUB KEGIATAN TA 20XX	
Perangkat Daerah :	
Program :	
Kegiatan :	
Sub Kegiatan :	
Kinerja :	
Indikator :	
Satuan :	
A. Latarbelakang	
1. Dasar Hukum.....	
2. Gambaran Umum	
B. Penerima Manfaat.....	
C. Strategi untuk Mencapai Kinerja	
(1) Metode Pelaksanaan	
(2) Tahapan dan Waktu Pelaksanaan.....	
D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran	
E. Biaya Yang Diperlukan.....	
Penanggung Jawab Kegiatan, Nama	
NIP/NRP.....	

Permendagri 90/2019:

Metadata **Sub Kegiatan** adalah sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dari penyelenggaraan sub kegiatan.

Atribut informasi yang ditambahkan pada Metadata Sub Kegiatan terdiri atas kinerja, indikator dan satuan:

- Kinerja** adalah hasil yang berupa keluaran (sub output) dari pelaksanaan sub kegiatan.
- Indikator** adalah alat ukur dari hasil pelaksanaan sub kegiatan.
- Satuan** adalah dasar ukuran dari indikator.

Terima kasih

**Perempuan Berdaya
Anak Terlindungi
INDONESIA MAJU**